

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Edisi 09
September 2019



5 TAHUN

CHIEF RA BERKARYA

Edisi
Khusus

Semoga lanjut..

Pengarah
Menteri Komunikasi
dan Informatika RI

Pembina
Sekretaris Jenderal
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika RI

**Penanggung Jawab &
Pemimpin Redaksi**
Ferdinandus Setu

**Redaktur
Pelaksana**
M. Taufiq Hidayat

Redaktur
Frans Bambang Irawan,
Daoni Diani Hutabarat,
Verawati, Helmi Fajar
Andrianto, Viskayanesya

Reporter
Patricia Samantha
Silalahi, Annisa
Bonita P., Yusuf,
Tommy Tirtawiguna

Fotografer
Agus Yudi Harsono,
Doni Paulus Sumule,
Sri Indrati Novinarsari

Desain & Layout
Adista Winda Rizka,
Rahma Aulia Indroputri,
Lamdza Rahmattunnisa

Produksi & Sirkulasi
Fahmie Trihatin Januarsyah

DIGITALISASI, SEHARI-HARI

Kadang tidak perlu memberikan contoh-contoh yang bombastis untuk menggambarkan sebuah perubahan besar. Contoh-contoh kecil yang terjadi sehari-hari, dapat digunakan untuk menyusun bangunan gambaran, bak potongan-potongan puzzle yang disusun untuk membentuk sebuah gambar besar.

Dalam masa lima tahun ini, saya berusaha sekuat tenaga untuk menghadiri setiap undangan untuk menjadi pembicara atau berdiskusi sebagai dukungan bagi ekosistem digital, sepanjang kehadiran saya tersebut bisa menyumbangkan nilai tambah bagi acara atau program atau institusi yang menyelenggarakan. Menghadiri satu demi satu stakeholder dan ekosistem digitalisasi adalah salah satu cara, kalau bukan satu-satunya cara, untuk memastikan bahwa negara atau pemerintah hadir berdiskusi dan tidak merasa paling pintar sendiri. Mungkin dalam undangan tertera bahwa kita hadir sebagai pembicara atau bahkan sering disebut sebagai pemberi arahan. Namun dengan hadir langsung, sejatinya justru lebih banyak waktu yang kita sediakan untuk mendengarkan.

Dalam satu hari bisa ada dua sampai lima undangan untuk berdiskusi, baik di perusahaan, komunitas, organisasi, kampus, sekolah, pemuka masyarakat, pemuka agama, dan sebagainya. Baik di dalam maupun di luar Jakarta, di dalam maupun di luar negeri. Heterogenitas ekosistem yang saya hadiri membuat saya merasakan langsung dan belajar banyak dari perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat yang menyangkut digitalisasi.

Dalam lima tahun itu pula terasa bahwa terjadi pergeseran isu, baik di industri maupun

di masyarakat. Tahun-tahun pertama di Kominfo, saya masih banyak hadir di acara-acara yang diselenggarakan oleh operator seluler, terutama dalam peluncuran layanan-layanan atau fitur baru. Kini, undangan dari operator seluler bisa dihitung dengan jari. Kehadiran saya kini lebih banyak dibutuhkan oleh perbankan dengan permintaan untuk berdiskusi tentang teknologi finansial, dengan kampus-kampus untuk berbicara mengenai tantangan tenaga kerja di masa depan berkaitan dengan Revolusi Industri 4.0 atau talenta digital, dengan komunitas-komunitas agama dan sosial untuk berkampanye melawan hoaks, dengan para startup baru untuk berdiskusi tentang model bisnis.

Semua melayangkan undangan berdiskusi bukan semata karena saya lebih pintar dalam soal-soal digitalisasi, namun lebih karena mereka ingin mendengar apa yang akan terjadi di masa depan sekaligus ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pertemuan-pertemuan fisik dan gagasan itulah yang kemudian membuat digitalisasi menjadi *domain* utama Kominfo. Bahkan ekstrimnya sering dianggap menjadi tanggung jawab tunggal Kominfo. Padahal seyogyanya, semua pihak di pemerintahan, kementerian dan lembaga, harus mempunyai pemahaman dan *roadmap* yang cukup untuk menyongsong digitalisasi.

Pergeseran isu itu pula yang membawa “pergaulan” saya dan Kominfo menjadi meluas ke berbagai ranah atau sektor lain. Tidak terbayang sebelumnya bahwa sebagai Menkominfo saya akan menemui tokoh-tokoh komunitas pengendara ojek dan taksi, baik *online* maupun *offline*, yang menyuarakan aspirasi yang kental bernuansa emosional di kantor kementerian. Contoh lain, ikut “mabar” alias “main bareng” juga merupakan pengalaman baru bagi saya untuk merasakan bermain *game* berbarengan secara *online* dan menemui para atlet dan komunitasnya.

Atas semua kecenderungan digitalisasi di sekitar kita itu, Kominfo harus bisa membaca situasi. Tidak untuk ikut latah menyambut era ini dengan sekadar menciptakan banyak jargon, namun harus memahami esensinya dan dengan demikian mampu membuat prioritas program kerja yang harus dieksekusi.

Akan hadirnya kementerian digitalisasi atau nomenklatur sejenis, yang pernah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kabinet mendatang, menunjukkan bahwa urusan digitalisasi teramat penting untuk dibiarkan berjalan sendiri(-sendiri).***

Rudiantara
Menteri Komunikasi
dan Informatika RI





01
PERSPEKTIF MENTERI

04
SURAT DARI MMB 9

08
LIPUTAN UTAMA

08
RUDIANTARA DAN
KONEKTIVITAS PITA
LEBAR



11
RUDIANTARA DAN
TATA KELOLA
INTERNET

14
RUDIANTARA DAN
DIGITALISASI

20
RUDIANTARA DAN
GOVERNMENT PUBLIC
RELATIONS

24
TOKOH KOMINFO



28
TIM RUDIANTARA:
LIS SUTJIATI

31
TIM RUDIANTARA:
DEDDY HERMAWAN

32
TIM RUDIANTARA:
DEDY PERMADI

35
TIM RUDIANTARA:
DONNY BUDI UTOMO

39
TIM RUDIANTARA:
DANRIVANTO B.



40

TIM RUDIANTARA:
FX BAMBANG IRAWAN

41

TIM RUDIANTARA:
RIKA SARTIKA

42

PUBLIK MENILAI:
DEWAN PERS

48

PUBLIK MENILAI:
KOMISI INFORMASI
PUSAT

50

PUBLIK MENILAI:
KOMISI PENYIARAN
INDONESIA



51

PUBLIK MENILAI:
INDOSAT OOREDOO

52

PUBLIK MENILAI:
TELKOMSEL

54

PUBLIK MENILAI:
XL AXIATA

56

TIM RUDIANTARA:
LEMBAGA PENYIARAN

72

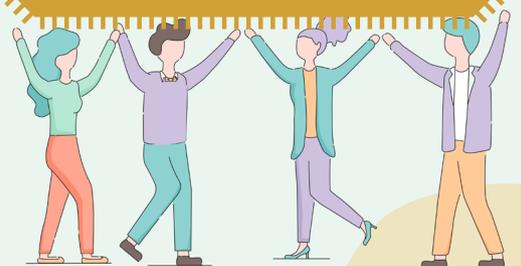
MITRA KOMINFO



Redaksi KominfoNEXT menerima artikel dalam bentuk **opini, liputan, atau tulisan ringan** lainnya sesuai dengan rubrikasi dalam KominfoNEXT. Naskah maksimal 2 halaman A4 spasi 1,5 dikirimkan melalui

majalahkominfoNEXT@kominfo.go.id

dengan subject: **Naskah Kominfo Next**. Bagi Penulis yang naskahnya dimuat akan mendapatkan honorarium sesuai dengan standar biaya masukan yang berlaku di tahun berjalan.



BONUM COMMUNE RUDIANTARA

Semua kita tahu bahwa Rudiantara dipilih dan ditunjuk Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2014 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bukan dari jalur partai politik. Sarjana Statistik Universitas Padjajaran ini bukan berasal dari fungsionaris partai politik manapun. Pria kelahiran Bogor, 3 Mei 1959 ini berasal dari jalur profesional. Literatur menyebutkan bahwa Profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan profesinya.

Ada tiga persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap profesional yakni: *skill*, pengetahuan dan *attitude*. Dari ketiga persyaratan tersebut, Rudiantara menunjukkan jati dirinya sebagai seorang profesional yang telah meniti karier dari bawah hingga ke level puncak direksi. Karier profesionalnya membentang panjang mulai dari Indosat, Exelcomindo, Telkomsel, PT PLN, PT Semen Gresik, PT Bukit Asam hingga PT Semen Indonesia. Berbagai prestasi berhasil ia torehkan sebagai profesional. Atasan raihan beragam prestasi tersebut yang membuat Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk menunjuk Rudiantara sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika RI periode 2014 s.d. 2019.

Memperhatikan kebijakan dan beragam program prioritas yang sukses dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kepemimpinannya, saya memberanikan diri menyebut Rudiantara sebagai seorang “politisi”. Jika kita membuka literatur ilmu politik, disebutkan bahwa Politisi adalah seseorang yang mengabdikan dan memperjuangkan nasib serta kepentingan rakyat, kata Aung San Suu Kyi, tokoh demokrasi Myanmar penerima hadiah Nobel Perdamaian 1991. Menimbang bahwa konsep politik itu lugas dan sederhana yang hanya menekankan dua kata yakni “kesejahteraan”

dan ‘umum’ atau yang dalam Bahasa Latin disebut sebagai ‘*bonum commune*’. Jadi orang berpolitik itu memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan bersama. Kesejahteraan umum atau *bonum commune* seperti apa yang telah diperjuangkan Rudiantara selama menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika RI selama 5 (lima) tahun kepemimpinannya?

Beragam program pro-rakyat telah digelar dan akan terus digelar. Litani *bonum commune* pertama, adalah Palapa Ring yang menjadi kebanggaan kita bersama. Proyek Palapa Ring, dapat dikatakan adalah *masterpiece* Menteri Rudiantara. Proyek pembangunan jaringan nasional *backbone* pita lebar (*broadband*) serat optik melalui infrastruktur *broadband* yang distruktur sebagai Public-Private Partnership (PPP)/Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan merupakan proyek PPP pertama di sektor telekomunikasi dengan Pemerintah berperan menyediakan penjaminan sehingga pada tahun 2019, 514 kabupaten/kota di Indonesia terjangkau oleh layanan *broadband*. Dimulai sejak tahun 2015, Palapa Ring dibagi menjadi tiga proyek yakni Palapa Ring Barat yang selesai konstruksinya pada awal tahun 2018, Palapa Ring Tengah yang selesai dibangun pada akhir tahun 2018, dan Palapa Ring Timur rampung pada Agustus 2019.

Litani kedua politik *bonum commune* Rudiantara adalah penyediaan Base Transceiver Station (BTS). Penyediaan BTS di daerah blankspot, khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman (lokasi prioritas, tertinggal, terluar dan terdepan/3T) yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019 dan Perka BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019. Sampai dengan Juli 2019, telah dibangun BTS di 331 lokasi dari total target 575 lokasi sampai dengan akhir tahun 2019. Masih banyak litani *bonum commune* yang telah ditorehkan Menteri Rudiantara selama 5 (lima) tahun memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Pada edisi khusus Majalah Koinfo Next kali ini, kami mencoba mengulas jejak karya Menteri Rudiantara sejak dilantik pada 27 Oktober 2014. Banyak tokoh kami hadirkan untuk berbicara mengenai sosok dan kepemimpinan Rudiantara. Mulai dari Yulianne Darwis, PhD., (Komisioner KPI), Ketua ATVSI Bapak Ishadi SK, Ketua Dewan Pers Prof M Nuh, Ketua KI Pusat Bapak Gede Narayana, hingga Direktur Utama PT Telkomsel, PT Indosat, dan PT. XL Axiata

Selamat Membaca !

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat



@FSetu



@FSetu



FSetu TV

IN

KOMINFO

we trust

KUNJUNGI KAMI DI:

 @KEMKOMINFO

 KEMKOMINFO

 @KEMENKOMINFO

 KEMKOMINFO TV

ATAU LANGSUNG
SCAN QR-NYA



ON GOING:

 Miss
Lambe Hoaks

2X DALAM
SEMINGGU
SENIN & KAMIS

SETIAP AKHIR
BULAN





1X DALAM
SEMINGGU

#KOMINFOPEDIA

2X DALAM SEBULAN

 TikTok
ID : Kemkominfo

SETIAP HARI

COMING SOON:

- KOMINFOHITS!
- VIRAL POSITIF
- KAMERA KOMINFO
- TAMU KOMINFO



5 TAHUN RUDIANTARA

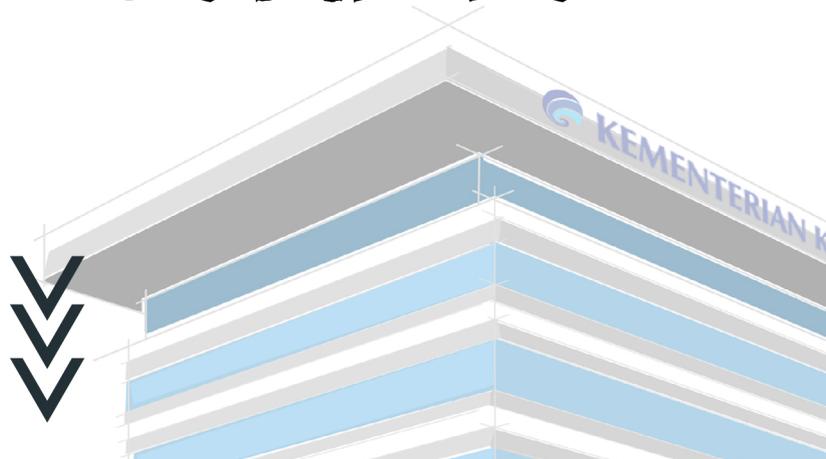
& CAPAIAN KEMENTERIAN KOMINFO

KONEKTIVITAS BROADBAND NASIONAL

- Pembangunan Palapa Ring Paket Barat, Tengah, Timur telah selesai 100%
- Penataan Pita Spektrum Frekuensi Radio (Refarming)
- Hingga Juli 2019, telah dibangun Base Transceiver Station (BTS) di 331 lokasi dari total target 575.
- Tersedianya akses internet di 147 lokpri perbatasan, 2407 daerah tertinggal dan 1812 di daerah non komersil lainnya.
- High Throughput Satellite (HTS) - ditargetkan beroperasi Tahun 2023

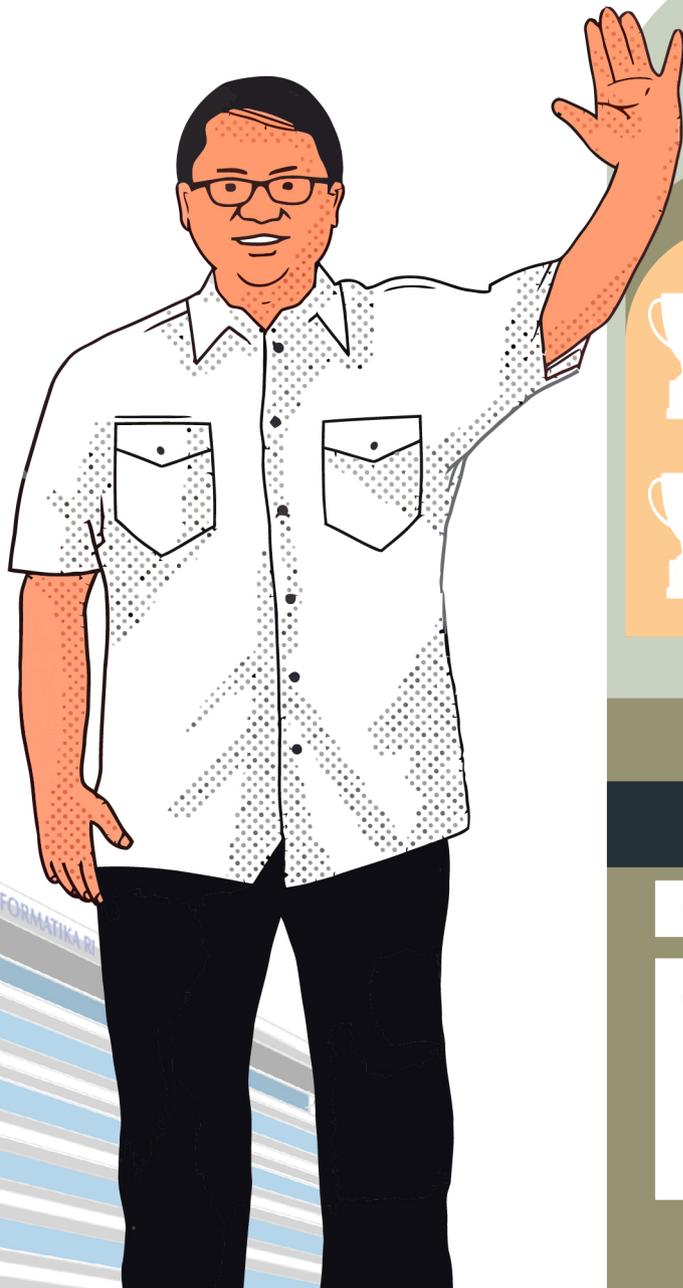
PEMBANGUNAN EKOSISTEM EKONOMI DIGITAL STRATEGIS

- UMKM Go Online - 9,6 juta UMKM telah go online
- 95% Petani dan Nelayan telah Go Online dari target 1 juta.
- Gerakan Nasional 1000 Start Up - total 584 Startup dari Juni 2016 s.d Juni 2019 yang sudah memiliki produk.



UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN KONTEN NEGATIF

- Pendekatan Hulu melalui Gerakan Nasional Literasi Digital
 - Didukung 101 mitra strategis dan telah menjangkau 442 daerah
 - Buku Literasi Digital telah diunduh 180ribu kali
- Pendekatan Hilir melalui Penanganan Situs dan Konten Negatif
 - Menangani 3,6 juta situs bermuatan negatif dari Tahun 2016 - Juni 2019
 - Menangani 530 ribu konten bermuatan negatif (komulatif hingga Juni 2019) di berbagai platform media sosial



Hattrick WTP: Tiga tahun berturut-turut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI



Meraih Badan Publik Informatif, kualifikasi tertinggi dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik 2018

LAYANAN PUBLIK

- Otomatisasi Perizinan
- Reformasi Regulasi – Penyederhanaan 38 Permenkominfo menjadi satu PM Kominfo No.7/2018, yang mencakup 4 jenis izin dan 6 layanan

PENGEMBANGAN SDM

- Digital Talent Scholarship : Beasiswa pelatihan intensif bagi 25ribu talenta digital untuk menyiapkan daya saing SDM bidang TIK



GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS

- Forum Merdeka Barat 9
- Tenaga Humas Pemerintah
- Digital campaign
- Media Radio & TV
- Narasi Tunggal
- Berita Online JPP & Infopublik
- Dialog Publik
- Pertunjukan Rakyat (PETUNRA)
- Media Dalam & Luar Ruang
- Aktivasi Komunitas

RUDIANTARA DAN KONEKTIVITAS PITA LEBAR

LOMPATAN KATAK UNTUK PEMERATAAN INFRASTRUKTUR TIK INDONESIA

Pemerintah mengambil langkah lompatan kebijakan (*leap frog*) untuk menggenjot pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, terutama di kawasan perbatasan.

Pembangunan konektivitas telekomunikasi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Bukan tanpa alasan, keberadaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi pemungkin pertumbuhan ekonomi dan sosial Indonesia.

“Kita semua tahu bahwa ICT *Infrastructure* ini menjadi modal perkembangan, pertumbuhan ekonomi, sosial, maupun matra lainnya di Indonesia. Jadi kalau kita tidak fokus mengembangkan ICT, kita tidak berpikir 10 tahun ke depan, kalau kita tidak berpikir 20 tahun ke depan, dan kita akan mengalami hal yang sama dari tahun ke tahun,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Rapat Kerja dengan Anggota Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (16/09/2019).

Sejak tahun 2005, Pemerintah telah memberikan perhatian khusus untuk pembangunan konektivitas telekomunikasi. Ketika itu, Proyek Palapa Ring digagas untuk menyatukan Indonesia melalui akses telekomunikasi. Upaya itu dipercepat melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Rencana Pita Lebar Tahun 2014-2019. Pemerintah berupaya mengikis kesenjangan akses telekomunikasi dan internet di seluruh pelosok Indonesia.

“Betul kita punya Palapa Ring, itu baru selesai tapi Palapa Ring itu kan sebetulnya konsepnya dari tahun 2005 bukan konsep yang baru, hanya eksekusinya yang baru dilakukan mulai tahun 2015,” ungkap Rudiantara.

KEJAR KETERTINGGALAN

Masalah pemerataan infrastruktur bukan satu-satunya pekerjaan rumah Pemerintah. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia dari Badan Pusat Statistik, IP-TIK Indonesia tahun 2017 sebesar 4,99, meningkat dibanding IP-TIK tahun 2016 sebesar 4,34. Namun, ada persoalan nyata: kesenjangan antarwilayah.

Meskipun IP-TIK level provinsi mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Data BPS menunjukkan bahwa provinsi dengan IP-TIK tertinggi pada tahun 2017 adalah DKI Jakarta, yaitu 7,61. Sedangkan provinsi dengan IP-TIK terendah adalah Papua, yaitu 2,95.

“Kalau kita bicara hanya Jakarta, kalau kita hanya bicara Jawa, itu infrastruktur ICT tidak menjadi masalah tapi pada saat kita bicara tentang Indonesia tantangan kita menjadi berbeda,” ungkap Chief RA, panggilan akrab Rudiantara.

Dalam konteks global, untuk menuju Government 4.0, Indonesia memang lebih bagus dibanding Paraguay, kemudian Mesir, Libya, Myanmar, Sudan. Namun tetap masih di bawah Thailand dan di bawah negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

“Di ASEAN pun kita bukan nomor 1 dalam hal ICT Index. Nomor satu Singapura, Malaysia





Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Bukan hanya infrastruktur saja, tapi juga pendidikan dan banyak lagi yang mengakibatkan ICT Index itu kita tahun 2016 berjumlah 114, tahun 2017 sebanyak 111. Namun tetap saja kita menjadi nomor 5 di ASEAN. Ini yang ingin kami kejar sebetulnya,” jelas Rudiantara.

Menurut Chief RA, negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand dapat membangun infrastruktur lebih mudah karena negara daratan. “Istilahnya narik kabel itu lebih mudah. Kalau kita harus menyeberang lautan dan lain sebagainya,” jelasnya.

Meskipun demikian, Indonesia berupaya mengejar ketertinggalan itu dengan melakukan terobosan. “Kita harus melakukan *leap frog*. Karena kalau tidak kita akan selalu tertinggal,” tandasnya.

BEDA CARA



Menteri Kominfo mengakui salah satu tantangan pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia adalah karena kondisi sebagai negara kepulauan. “Kita bicara di ASEAN saja

ICT Infrastructure Index kita bukan nomor 1, mengapa? Karena tantangan kita, negara kita adalah negara kepulauan,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Menteri Kominfo, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia harus dilakukan dengan cara yang berbeda.

“Jadi cara membangun infrastrukturnya tentu berbeda dengan negara tetangga. Negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, itu mereka membangun akan lebih mudah karena mereka negara daratan, istilahnya narik kabel itu lebih mudah kalau kita harus menyeberang lautan dan lain sebagainya,” jelasnya.

Secara khusus, Menteri Rudiantara menyatakan bahwa langkah yang diambil Pemerintah menekankan pada dua strategi. “Satu sebetulnya dorong operator. Artinya korporasi, mereka fokusnya adalah di daerah yang dianggap secara keuangan atau secara bisnis *feasible*. Namun, mereka harus memberi kontribusi untuk daerah yang tidak dianggap *visible* melalui namanya dana KPU atau Kewajiban Pelayanan Umum atau kita kenal namanya Universal Service Obligation (USO),” jelasnya.

Hal kedua yang bisa dilakukan oleh Pemerintah adalah mengalokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Mengacu kepada Undang-Undang, fokus dari pada belanja pemerintah ke pendidikan dan kesehatan. Nah, kita pun dari sisi infrastruktur ICT itu mendekati pendekatan 20% pendidikan dan 5% kesehatan karena dua sektor itu menjadi prioritas,” ungkapnya.



LOMPATAN KEBIJAKAN



Lompatan kebijakan telah diambil Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dua proyek yang ada di Kementerian Kominfo yaitu Jaringan tulang punggung internet cepat Palapa Ring dan Satelit Multifungsi Satelit Indonesia Raya (SATRIA).

Palapa Ring merupakan bangunan tol informasi dalam bentuk serat optik yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Sebagai infrastruktur tulang punggung jaringan telekomunikasi *broadband* (pita lebar), Palapa Ring terdiri dari tiga paket, yaitu Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, dan Palapa Ring Paket Timur.

Selain menghubungkan seluruh Indonesia dalam jaringan telekomunikasi, pembangunan Palapa Ring ditujukan untuk mengikis kesenjangan layanan telekomunikasi antara di Pulau Jawa dengan daerah lain di Indonesia.

“Alhamdulillah, Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur sudah selesai bangunannya dan sudah beroperasi,” jelas Rudiantara.

Pembangunan Palapa Ring dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau *public private partnership* (PPP). Pembiayaan yang diterapkan dengan skema *availability payment*, memungkinkan pemerintah memulai pembayaran penggantian modal yang ditanamkan investor setelah proyek beroperasi. Pemerintah menggunakan dana *universal service obligation* (USO) untuk operasional Palapa Ring. Dana USO merupakan dana kontribusi perusahaan telekomunikasi dengan bobot 1,25% setiap kuartalnya.

Setelah semua proyek Palapa Ring ini selesai, Menteri Kominfo mengharapkan seluruh daerah di pelosok Indonesia dapat terhubung dengan akses internet, sehingga tidak ada lagi kesenjangan akses internet di Indonesia. “Melalui Palapa Ring, semua daerah di seluruh

Indonesia dapat terhubung dengan jaringan internet cepat,” harapnya.

Menteri Kominfo mengharapkan ke depan akan ada peningkatan kapasitas layanan. Pasalnya kebutuhan nanti tidak hanya untuk sektor pemerintahan, melainkan kesehatan dan pendidikan. “Jadi kita masih betul-betul harus membangun. Nanti kita harus masuk lagi ke pada satelit berikutnya yang kapasitasnya jauh lebih besar, satelit berikutnya lagi yang kapasitasnya jauh lebih besar lagi, sehingga yang namanya *broadband* itu betul-betul dalam waktu, katakan 7 tahun (paling lama 10 tahun) itu sudah bisa mengkoneksikan semua sekolah dan sudah mengkoneksikan semua yang namanya Puskesmas dan sudah mengoneksikan semua kantor desa,” harapnya.

Tentu, semua dibutuhkan lompatan untuk membangun infrastruktur dengan kapasitas yang lebih besar. “Kita harus membangun secara *leapfrog*, tidak bisa lagi satu-satu, artinya teknologi ini besok teknologi apa yang beriringan. Kita harus berani mengambil keputusan untuk melakukan *leapfrog* untuk menyediakan kebutuhan dari negara ini. Satu dan lain cara negara ini kebutuhannya akan akses internet itu harus dipenuhi,” tandas Rudiantara.

Menurut Rudiantara dalam Perpres proyek strategis nasional ada pengadaan satelit. “Satelitnya pun *leapfrog* bukan satelit komunikasi yang digunakan oleh operator sekarang, satelitnya satelit khusus untuk internet kecepatan tinggi karena kita melihatnya *forward-looking* itu kita tidak bicara lagi istilahnya *circuit switch* tapi kita bicaranya nanti kepada *internet protocol* jadi semua serba internet, internet, internet,” jelas Rudiantara.

Menurut Rudiantara, satelit yang dibangun ini memiliki kapasitas 150 GB. “Ini *high throughput satellite* atau satelit dengan kecepatan tinggi. Ini yang paling besar di Asia untuk HTS, saat ini. Kalau kita bicaranya 5 tahun lagi, kita bicaranya 10 tahun lagi, ini ukurannya kecil dan kebutuhan yang lebih besar,” ungkapny.

Misi pemerintah untuk menyatukan Indonesia melalui internet, menurut Menteri Kominfo bisa dicapai pada tahun 2020. “Impian untuk menyatukan Indonesia lewat internet bukan lagi impian. Saya yakin Indonesia akan merdeka internet tahun 2020,” kata Rudiantara.

RUDIANTARA DAN TATA KELOLA INTERNET

IST

Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penataan ulang organisasi dan sumberdaya manusia dalam sektor aplikasi informatika. Struktur baru yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika itu, menetapkan struktur organisasi baru pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, demi mengantisipasi dinamika digitalisasi dan konten digital di Indonesia.

Hal ini didorong atas keinginan Menteri Rudiantara melakukan reformasi birokrasi dalam bentuk restrukturisasi yang strategis. Selain itu juga untuk mengubah lembaga atau organisasi di Kominfo yang lambat dalam melakukan kegiatan, maka diperlukan restrukturisasi yang strategis dalam mencapai tujuan.

Secara umum, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) yang dipimpin oleh Samuel Abrijani Pangerapan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatalaksanaan aplikasi informatika. Dalam menjalankan tugas tersebut, Ditjen Aptika memiliki 3 fungsi utama, yaitu: melakukan transformasi kepada masyarakat, transformasi kepada dunia usaha, dan transformasi kepada pemerintah.

Restrukturisasi yang dilakukan pada 2018 lalu berdampak pada seluruh direktorat di lingkup Ditjen Aptika. Salah satunya adalah kehadiran Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, yang bertugas menjadi perumus kebijakan, norma,

standar, prosedur, hingga kriteria yang akan dijadikan pedoman di bidang penatalaksanaan aplikasi informatika.

Senin pagi, 15 September 2019, Tim Majalah Kominfo Next berkesempatan menyambangi Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Mariam Fatima Barata di ruang kerjanya. Berbagai topik dibahas dalam obrolan di pagi itu, mulai dari pandangannya dalam menerjemahkan arahan tugas baru yang diamanatkan Menkominfo kepadanya, hingga pengalamannya selama 5 tahun bekerja bersama di bawah kepemimpinan Menteri Rudiantara.

Jabatan tangan erat dan ucapan mempersilakan masuk, membuat kami nyaman berbincang dengan beliau di sofa ruang kerjanya. Tim KominfoNext merasakan bahwa Mariam ingin obrolan di pagi itu mengalir senyaman mungkin.

Mengawali perbincangan, Mariam bercerita tentang permintaan Menteri Kominfo mengenai penataan dan penyegaran sumberdaya manusia di lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika. Hal ini dimasukkan agar dapat meningkatkan kinerja dan layanan kepada masyarakat. Secara khusus, Menteri yang akrab disapa Chief RA ini mendorong pejabat yang baru dilantik untuk memberikan nilai tambah kepada sektor digital yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Saya ingat betul waktu itu Menteri Rudiantara menyampaikan bahwa menjadi pejabat itu harus memaknai aturan, harus bisa memberikan nilai tambah,” katanya mengutip sambutan Menkominfo dalam acara Pelantikan Pejabat Administratur dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kominfo, September 2018 lalu.



WAWANCARA DENGAN
MARIAM FATIMA BARATA
DIREKTUR TATA KELOLA
APLIKASI INFORMATIKA
DITJEN APLIKASI
INFORMATIKA



Jawab Tantangan

Saat dipapuk menjadi Direktur Tata Kelola, Mariam menuturkan bahwa sebenarnya ia bukan orang yang menguasai hukum dan teknologi. Hati kecilnya bertanya-tanya mengapa ia yang terpilih ditempatkan di bagian yang mengurus produk hukum padahal dirinya lebih fasih menangani komunikasi. “Kenapa? Saya bukan orang hukum. Kenapa saya tidak ditempatkan diposisi lain yang sesuai dengan jurusan saya? Saya harus belajar hukum, untuk teknologi memang saya sudah belajar sewaktu pernah menjabat menjadi Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika karena memang terkait aplikasi informatika. Kemudian di Sesditjen lebih banyak mengurus administrasi meskipun hukumnya itu juga bukan yang membuat peraturan hukum, waktu itu hanya membuat *legal drafting*,” jelasnya.

Meskipun tertatih-tatih karena tidak sesuai jurusannya dan faktor usia yang sudah tidak muda lagi untuk cepat menghafal, namun ini tak menjadikan alasan baginya untuk mundur. Justru Mariam mengakui inilah tantangannya untuk menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Chief RA. “Mengatasi hal tersebut saya menyasiatinya dengan merekrut para punggawa yang mengerti produk hukum dari Sesditjen Aptika Kominfo untuk memudahkan saya dalam bekerja di Direktorat Tata Kelola”, jelas Mariam.

Mariam pun menyampaikan apresiasi kepada para stafnya karena mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang hukum yang senantiasa membantunya agar lebih memahami tentang hukum. “Saya jadi belajar apa itu hukum, *lex specialist*, *lex generalis*, ya macam-macam lah bahasanya, kenapa ini harus begini, ya, semua harus dipelajari”, paparnya.

Untuk ke depannya, Mariam mengatakan ada hal besar yang ia lihat dari Tata Kelola, bahkan sangat besar. Tata Kelola bukan



“SELAMA BISA
MEMBERIKAN NILAI
TAMBAH, POSISI
APAPUN TIDAK
MASALAH. JANGAN
JADIKAN JABATAN
ITU TUJUAN DALAM
KINERJA,”

ISI

hanya menghasilkan suatu produk hukum, tetapi juga harusnya menghasilkan suatu strategi yang didasari dari apa yang dicanangkan oleh Presiden maupun Menkominfo terkait dengan digital ekonomi. Karena ke depannya digital ekonomi memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia sehingga dirasa perlu untuk menyusun “Strategic Planning of Facilitation Application of Informatics”. “Makanya saat ini saya mencoba membuka wawasan saya di tata kelola, bukan hanya untuk menghasilkan produk hukum tapi bagaimana strategi Ditjen Aptika untuk mencapai tujuan yang diinginkan,” katanya. “Saya punya mimpi besar tentang *digital economy*. Saya buat kajian kecil yang akan dituangkan



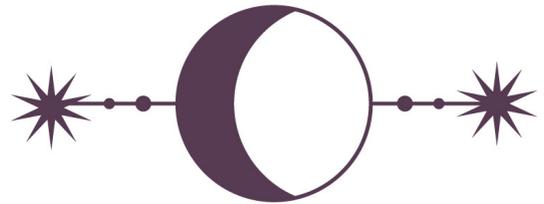
dalam bentuk Kerangka Acuan kerja (KAK) untuk diusulkan menjadi suatu kegiatan tahun yang akan datang. Yang kita utamakan tidak hanya mengenai kecepatan suatu kegiatan atau program, tetapi juga melihat dampak bagi masyarakat kedepannya harus memiliki peningkatan dalam pertumbuhan industri, e-commerce maupun digital ekonomi,” tuturnya Mariam.

Sosok Rudiantara

Menurut pandangan Mariam, Chief RA yang punya ciri khas dengan guyon andalan “yang tepuk tangan saya doakan masuk surga” menandakan seorang pejabat negara yang tidak protokoler, artinya dia bisa memanggil siapapun untuk sesuatu yang harus dilaksanakan segera. “Jadi eskalasinya tidak harus melalui Eselon I, tapi dia bisa memanggil Eselon II, III, IV, bahkan hingga staf kalau itu memang dibutuhkan,” tutur Mariam. Yang kedua, lanjutnya, pria tinggi besar yang dipanggil pada urutan ke-13 oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada 26 Oktober 2014 untuk didapuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika ini, selalu menekankan untuk bekerja cepat dan akurat. Jadi jika ada hambatan untuk proses birokrasi, Menkominfo Rudiantara tidak segan-segan untuk mau membantu.

“Misalnya begini, jika proses koordinasi dengan K/L atau stakeholders menemui jalan buntu, maka beliau dengan senang hati akan turun tangan. Contoh kami di Tata Kelola ini kan banyak mengurus produk hukum. Jadi sekali waktu saya dipanggil soal penyusunan PP PSTE, beliau menanyakan kendalanya seperti apa? Bahkan sampai menawarkan bantuan jika diperlukan. ‘Saya bisa lho menghubungi pihak terkait, dan saya bersedia membantu membereskan sesuatu jika mengalami hambatan. Atau Pak Menteri sering juga mengatakan “Use Me” untuk membantu menyelesaikan masalah dengan K/L lain,” ungkap Mariam menirukan pesan Menkominfo. Menyoal pergantian pejabat, Mariam meyakini keputusan Menteri Kominfo tersebut guna memperkuat lini dalam meningkatkan tata kelola dan layanan aplikasi informatika bahwa jabatan harus menjadi sarana untuk memberikan nilai tambah kepada layanan masyarakat. “Selama bisa memberikan nilai tambah, posisi apapun tidak masalah. Jangan jadikan jabatan itu tujuan dalam

kinerja,” tandasnya menyontohkan sambutan orang nomor satu di Kementeriannya itu. Mariam menambahkan, hal lain yang selalu ia ingat dari sosok Menteri yang gemar mengenakan *sneakers* warna cokelat kekinian itu adalah terkait dengan Pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Dalam ingatan Mariam, pesan dari Menkominfo agar mempermudah proses perizinan atau pendaftaran, terpatri dalam benaknya. “Jadi sosok Menteri Rudiantara menurut saya bukanlah pribadi yang ingin menunjukkan sebagai seorang yang *centralize* harus kepada beliau semua urusan kantor. Hal ini terbukti dengan keinginannya secara legowo menyerahkan amanat kepada eselon satunya untuk proses perizinan ataupun pendaftaran. Semua ini untuk mempercepat proses dan nggak perlu nunggu sampai berapa lama mendapatkan suatu izin atau status terdaftar, jelasnya. (hm.ys)



RUDIANTARA DAN DIGITALISASI

DIGITAL PERBATASAN,

MENJAHIT INDONESIA
DARI BERANDA DEPAN

Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang DPR dan DPRD tanggal 16 Agustus yang lalu menyatakan Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air dan pembangunan yang dilakukan harus Indonesia sentris yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, selaras dengan Visi Nawa Cita, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”, Pemerintah meresmikan siaran digital pertama di perbatasan negara atau beranda depan, Nunukan, Kalimantan Utara.

Momentum itu menjadi salah satu tonggak sejarah pertelevisian dan telekomunikasi di Indonesia. Dengan dimulainya siaran televisi digital di Nunukan, Batam dan Jayapura bertepatan dengan suasana perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia.

Sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2019 untuk melakukan percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara berikut sarana-sarana penunjangnya, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi dan pemancar penyiaran.

“Penyelenggaraan penyiaran di daerah perbatasan merupakan hal yang sangat strategis. Kementerian Kominfo mengapresiasi inisiatif yang lebih dulu dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan TVRI di tahun 2017 untuk melaksanakan proyek uji coba penyiaran di perbatasan yang dimulai di empat lokasi, termasuk Nunukan, melalui kolaborasi relai siaran stasiun-stasiun TV swasta melalui infrastruktur multiplexer TVRI,” tutur Menteri Kominfo Rudiantara, dalam peresmian Program

Digitalisasi Perbatasan yang bertema “Digital di Perbatasan, Menjahit Indonesia dari Perbatasan, di GOR Nunukan, Nunukan Kalimantan Utara, Sabtu (31/08/2019).

Menurut Menteri Kominfo, Pemerintah bekerja bersama dengan swasta menghadirkan penyiaran yang berkualitas dan ragam konten, secara bertahap hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

“Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dipilih menjadi contoh teknologi pertama penyiaran digital dengan tiga lembaga penyiaran publik TVRI, Metro TV, dan Trans TV ditunjuk menjadi penyelenggara sistem multiplexer di wilayah Nunukan,” tuturnya.

Digitalisasi di perbatasan diresmikan dengan penekanan tombol oleh Menkominfo Rudiantara yang didampingi Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie dan Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, Ketua KPI Agus Suprio, Direktur TVRI Helmi Yahya, Dirut BAKTI Anang Latif, dan Ketua ATVSI, Ishadi.

Peran Strategis

Penyiaran televisi digital di Nunukan dan di kawasan perbatasan memiliki nilai strategis sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan Timur. Dalam beberapa tahun ke depan Kabupaten Nunukan, akan menjadi salah satu gerbang terdepan Indonesia menuju ke ibu kota baru.





“Telekomunikasi dan penyiaran mempunyai peran yang strategis dalam memperkuat persatuan dan kedaulatan bangsa, menunjang kegiatan perekonomian, serta memiliki peran vital untuk edukasi masyarakat,” tutur Menteri Kominfo.

Tidak hanya itu, dengan beralih ke TV digital, dapat dilakukan efisiensi penggunaan spektrum

frekuensi. Sebab, frekuensi yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan TV analog dapat dibagi untuk kebutuhan lain. “TV analog saat ini memanfaatkan pita frekuensi di 700 Mhz yang disebut-sebut sebagai salah satu spektrum terbaik untuk menggelar layanan *broadband*,” tutur Rudiantara.

Oleh karena itu, Menteri Kominfo mengharapkan frekuensi yang memiliki pita selebar 336 Mhz ini dapat dimanfaatkan untuk layanan internet pita lebar dan kebencanaan. “Untuk di Nunukan ini, kami menyebutnya sebagai *simulcast*. Jadi, dapat menyiarkan bersamaan konten secara analog dan digital. Ini merupakan masa peralihan atau transisi, sebelum nantinya masuk ke *analog switch off (ASO)* atau sistem analog benar-benar dimatikan,” papar Rudiantara.

Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif menyebut diseminasi informasi menjadi hal vital bagi masyarakat untuk meminimalisasi disparitas pengetahuan antara masyarakat di pinggiran dan pusat.

Menurut Anang, siaran digital bagi masyarakat di perbatasan sejalan dengan upaya yang tengah dilakukan BAKTI mewujudkan pemerataan sinyal telekomunikasi di seluruh Indonesia. “Siaran televisi digital bagi masyarakat di perbatasan menjadi sinyal komitmen nyata pemerintah pusat bagi pemerataan informasi. Momentum ini penting mengingat peluncuran siaran digital dilakukan di Nunukan, Kalimantan Utara yang merupakan daerah pemekaran dari Kalimantan Timur. Tempat bagi ibu kota baru,” tandasnya.



RUDIANTARA DAN DIGITALISASI

MELIHAT SOSOK MENTERI RUDIANTARA NYOMAN ADHIARNA MEMBUTUHKAN PEMIMPIN TIPE EKSEKUTOR

Jakarta, Kominfo - “Pak Menteri Rudiantara, adalah seorang profesional yang selalu berorientasi pada pencapaian sasaran.” Pendapat ini disampaikan Plt Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kemenkominfo, I Nyoman Adhiarna, beberapa saat yang lalu, ketika diminta penilaiannya terhadap sosok Menteri Kominfo Rudiantara.

Selanjutnya Nyoman menambahkan, dalam banyak kesempatan Chief RA sering menganggap dirinya lebih sebagai eksekutor daripada konseptor. “Menurut saya, ini tipe kepemimpinan yang tepat di jaman sekarang ini. Dalam pemerintahan sekarang ini, kita membutuhkan lebih banyak pemimpin tipe eksekutor,” kata Nyoman.

Berikut ini ungkapan Nyoman Adhiarna selama bekerja dibawah kepemimpinan Menteri Rudiantara; Pengalaman saya selama lebih dari 25 tahun sebagai pegawai negeri, sering waktu kita dihabiskan lebih banyak untuk menyusun konsep tetapi kemudian pelaksanaan/ eksekusinya sering lemah. Untuk mengubahnya cara kerja kita harus berubah. Pola pikir birokrasi harus diubah, selalu mencoba membuat terobosan dalam implementasi. Juga setiap orang harus berkontribusi menciptakan nilai tambah dalam rantai proses dan bukan menjadi penghambat.

“Kami ingat beliau pernah melakukan presentasi pada masa-masa awal sebagai Menteri, Pak Rudiantara membawa sendiri USB dan memasukkannya ke laptop dan beliau

kemudian menjadi asisten sorot (asrot) dalam menyampaikan paparannya tanpa meminta bantuan staf.”

Ketika ditanya apakah ada amanat khusus ketika ditunjuk sebagai Plt Direktur Ekonomi Digital, dan bagaimana dia menerjemahkan perintah Menkominfo, dijawab oleh Nyoman Adhiarna, “Hingga saat ini belum ada amanat khusus dari beliau terkait bidang ekonomi digital,” jelas Nyoman. “Tetapi kami sudah mendengar arahan beliau dalam banyak kesempatan, termasuk saat kami mendampingi beliau persiapan dan sidang G20, atau melalui media komunikasi internal Kementerian Kominfo. Beliau mengharapkan bahwa Direktorat Ekonomi Digital, Ditjen Aptika, harus mampu mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital yang mendukung penciptaan nilai tambah di masyarakat dan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Arahan Pak Menteri inilah yang selalu saya jadikan acuan kerja,” ujar Nyoman.

Dalam pelaksanaannya, kata Nyoman, program-program di Direktorat Ekonomi Digital mencakup diantaranya kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga membantu mempercepat digitalisasi 7 sektor strategis yang mencakup: pertanian, kesehatan, pendidikan, pariwisata, keuangan, perhubungan dan ekonomi kreatif. “Kami juga melaksanakan beberapa inisiatif Kementerian kominfo terkait digitalisasi sektor strategis misalnya: UMKM Go Digital, Petani Go Digital



(Smart Farming) dan Nelayan Go Digital (Smart Fishery) dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT),” tuturnya.

Plt Direktur Ekonomi Digital, Ditjen Aptika Kemkominfo, Nyoman Adhiarna, menceritakan kesannya selama bekerja dengan Menteri Rudiantara. Menurut Nyoman, banyak kata-kata Pak Menteri yang disampaikannya dalam berbagai kesempatan yang menjadi pegangan. Misalnya, Kementerian Kominfo harus mampu berperan lebih banyak dari hanya sekedar sebagai regulator, tapi lebih sebagai fasilitator dan bahkan lebih jauh lagi sebagai akselerator bagi stakeholder terutama dunia usaha.

“Ini memang perlu perubahan mindset dan sangat relevan bagi Ditjen Aptika Kominfo karena dalam ekonomi digital tidak bisa lagi kita terlalu banyak mengatur atau membuat aturan. Teknologi dan perilaku masyarakat berubah dengan cepat karena itu peran kita

harus berubah kalau tidak kita akan tertinggal. Berperan sebagai regulator saja sekarang tidak lagi memadai,” tandas Nyoman.

Menyangkut dukungan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Ekonomi Digital, terhadap 3 Segmen penerapan roadmap e-commerce (UMKM, perusahaan e-Commerce yang established & perusahaan rintisan bidang teknologi), Nyoman Adhiarna menjelaskan, hingga saat ini dukungan yang diberikan pemerintah melalui program-program direktorat ekonomi digital adalah sebagai berikut:

1. Kita mendorong UMKM untuk go digital salah satunya adalah dengan mendorong pedagang melakukan on boarding yaitu dengan bermigrasi berjualan secara online dengan menjadi merchant (pedagang) di marketplace / platform perdagangan digital. Ini harus dilakukan secara berkesinambungan melalui

program pendampingan. Beberapa dari UMKM yang tidak aktif dalam kurun waktu tertentu akan terhapus sendirinya dalam marketplace. Karena itu pekerjaan pendampingan yang berkesinambungan menjadi penting.

2. E-Commerce yang established akan didorong terus berkembang. Caranya, dengan memfasilitasi mereka untuk dapat bertemu dengan investor dari luar negeri. Keterlibatan beberapa startup dan unicorn dalam forum-forum internasional seperti World Economic Forum di Davos, Swiss, melalui fasilitasi Kementerian Kominfo adalah salah satu upaya ini sehingga mereka menjadi lebih dikenal di dunia.

3. Perusahaan rintisan bidang teknologi juga didorong memperkenalkan inovasi dan produknya dalam beberapa kegiatan dan festival Kominfo misalnya program Republic of IoT sehingga makin dikenal luas oleh publik serta inovasi dan solusinya bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Pertanyaannya, apa yang kini dilakukan Direktorat Ekonomi Digital dalam mendukung financial inclusion, shared economy, dan workforce digitalization dan ke depannya langkah apa yang akan diterapkan. Nyoman Adhiarna menjelaskan, tiga model bisnis yang disebutkan tersebut adalah tiga model bisnis yang dapat mendorong perkembangan ekonomi yang inklusif.

Pada dasarnya, kata Nyoman, pengembangan ekonomi digital misalnya penerapan Industry 4.0 tanpa strategi yang tepat justru dapat mempercepat hilang banyak lapangan kerja. Apabila diterapkan dengan menggunakan semangat ekonomi yang inklusif, pengembangan ekonomi digital dapat menekan kesenjangan kekayaan dan pendapatan suatu negara yang tercermin dalam indeks rasio Gini.



Karena itu Nyoman menyimpulkan, inklusi keuangan perlu menjadi prioritas. Masih banyak masyarakat kita yang belum punya akses perbankan sehingga perkembangan ekonomi digital hendaknya juga dapat mendorong akses keuangan bagi banyak masyarakat Indonesia.

“Beberapa program yang kami lakukan saat ini adalah UMKM go online. Banyak pedagang kecil-kecil di pasar tradisional saat ini yang belum punya akses perbankan. Kami sekarang mendorong mereka selain onboarding juga memanfaatkan sistem pembayaran digital dalam melakukan transaksi. Pendekatan ini tentu berbeda dengan bank-bank daerah yang mendorong mereka memiliki akses perbankan,” terang Nyoman.

Menteri Rudiantara dalam beberapa kesempatan saat menjadi keynote speech sering berkata bahwa contoh data dari Bukalapak atau Tokopedia, mereka membuka banyak merchant. Merchant itu UMKM kelasnya, menjadi penjual dari produk-produk. Contoh lain juga Go-food, itu creating entrepreneur baru yang tadinya jago masak kalau bikin restoran kan harus menyewa tempat dan sebagainya. Sekarang kalau masakannya bagus ya masak saja di dapur karena Go-food akan datang jemput makanan yang dipesan.

Pertanyaannya, bagaimana kontribusi sektor e-Commerce dapat mendorong UMKM dan perekonomian nasional?

Nyoman Adhiarna menjelaskan, peran e-Commerce sangat besar dalam mendorong perkembangan UMKM dan perekonomian nasional. Disebutkan bahwa Riset McKinsey

menyebut kontribusi ekonomi digital Indonesia pada 2020 diprediksi mencapai 150 miliar USD atau 10% dari PDB. Ini angka yang cukup besar. Pemanfaatan e-commerce dapat mendorong perkembangan UMKM dan akan memperbesar pertumbuhan UMKM di Indonesia.

“Selain itu e-commerce akan mendorong lebih banyak produsen (makers) bagi produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri yang kemudian dapat dijualbelikan secara online, bukan semata-mata sebagai reseller. Hingga saat ini menurut catatan Kemenko Perekonomian, sekitar 95% merchant di e-commerce marketplace adalah reseller bukan makers, artinya hanya menjual barang orang lain, bukan membuat sendiri” jelas Nyoman. (hm.ys)



Nyoman Adhiarna

Kasubdit Tata Kelola Sistem
Elektronik dan Ekonomi Digital

Plt. Direktur Ekonomi Digital
Ditjen Aptika

RUDIANTARA DAN GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS



Sinergitas komunikasi dan kecepatan diseminasi informasi menjadi kunci dalam pengelolaan komunikasi pemerintah. Adanya sinergitas yang kuat menjadi unsur penting dalam upaya mempercepat proses diseminasi informasi melalui berbagai kanal yang dimiliki oleh instansi pemerintah baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kecepatan berkomunikasi kepada publik. “Tantangan bagi kita ke depan makin berat, kembali ke masalah kecepatan. Pemerintah harus bekerja cepat,” tegasnya saat melantik Prof. Widodo Muktiyo sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, di Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Pemerintah dikatakan Menteri Rudiantara memiliki kemampuan membuat *agenda setting* dengan perangkat dan infrastruktur

yang dimiliki. Meski lebih sering terkendala birokrasi yang ada. Oleh karena itu perlu untuk membuat terobosan baru yang efektif dan efisien.

Hadirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik mengamanatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah (Government Public Relation/ GPR). Sehingga Kementerian Kominfo ikut berperan dominan dalam menyebarkan informasi terkait kebijakan publik terutama program strategis pemerintah.

Terkait hal ini maka komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D) akan lebih efektif jika komunikasinya terintegrasi. Prinsip pengelolaan komunikasi publik ini dilakukan melalui Narasi Tunggal yaitu narasi positif dari K/L/D terkait program, kebijakan, dan kegiatan pemerintah yang perlu diketahui oleh masyarakat.

Alur dari pengelolaan komunikasi publik ini dimulai dari

pengumpulan data, verifikasi data dan informasi untuk selanjutnya diolah menjadi produksi pesan (konten) berupa siaran pers, infografis, videografis, dan lainnya. Kemudian dilakukan diseminasi informasi dari narasi tunggal tersebut melalui berbagai kanal yang dimiliki oleh K/L/D.

Selain itu, dalam mendukung aktivitas komunikasi publik kementerian dan Lembaga pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga melakukan perekrutan Tenaga Humas Pemerintah (THP) yang ditempatkan di berbagai kementerian dan Lembaga.

Pemilihan mekanisme rekrutmen THP itu dimaksudkan untuk mengakselerasi komunikasi pemerintah agar lebih sinergis. THP sendiri dipilih melalui seleksi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) maupun swasta dengan kriteria tertentu. Selain memiliki pengalaman di bidang kehumasan minimal 3 tahun juga memiliki kualifikasi profesional, misalnya kemampuan menulis, mengelola media sosial dan media relations. Para THP tersebut akan berfungsi sebagai penghubung komunikasi publik antar kementerian dan Lembaga agar lebih sinergis.



Forum Merdeka Barat 9 pertama digelar pada 5 Maret 2017 di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan

Kementerian Kominfo juga melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik memiliki sebuah forum resmi pemerintah dalam menyampaikan informasi strategis, kebijakan lintas sektoral dan klarifikasi isu yang berkembang di masyarakat yang dinamakan Forum Merdeka Barat 9 atau disebut FMB 9. Forum ini menjadi ajang interaksi langsung insan pers untuk mengklarifikasi dan menggali informasi dari pemerintah. FMB 9 juga menjadi acuan informasi terpercaya (*fact checking*) terhadap isu yang berkembang di masyarakat dengan menghadirkan menteri, pimpinan lembaga sebagai narasumber.

FMB 9 ini juga tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menyerap informasi yang berkembang di media dan publik dengan beragam topik mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, teknologi, agama, hukum dan HAM, lingkungan dan olahraga. Manfaat dari Forum Merdeka Barat 9 antara lain untuk merespon isu yang berkembang di publik, menyampaikan program dan prestasi pemerintah dan untuk mengurai krisis komunikasi publik.

Di samping melalui narasi tunggal, Tenaga Humas Pemerintah dan Forum Merdeka Barat 9, Kementerian Kominfo juga memanfaatkan berbagai media lainnya dalam melakukan diseminasi informasi diantaranya *digital campaign*, media radio dan televisi, kegiatan *outreach*, berita online JPP dan Infopublik, dialog publik, pertunjukan rakyat (PETUNRA), media dalam dan luar ruang, serta aktivasi komunitas.

Salah satu contoh penggunaan alur kerja pengelolaan komunikasi publik dalam menyampaikan berbagai program pemerintah, Kementerian Kominfo menjadi koordinator Pilar ke-2 untuk kampanye penurunan Prevalensi stunting bersama kementerian Kesehatan RI. Target kampanye adalah peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat. Sosialisasi yang telah dilakukan mampu menjangkau khalayak sebanyak 33.521.283 Orang pada tahun 2018 dan 23.368.226 Orang pada tahun 2019.

Selain itu Kominfo juga berperan sebagai media sosialisasi pemilu serentak. Pada tahun 2019, Indonesia baru saja melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden. Kementerian Kominfo ikut berperan melaksanakan sosialisasi pemilu serentak 2019. Sosialisasi telah menjangkau khalayak sebanyak 56.785.000 orang pada tahun 2018 dan 227.533.289 orang pada tahun 2019.

Kominfo juga aktif dalam melakukan Sosialisasi Pembangunan Karakter Bangsa (Revolusi Mental, Pancasila dan Generasi Anti Hoax) yang bekerjasama dengan Komisi I DPR RI dan Seluruh Lembaga Agama (MUI, KWI, PHDI, PGI, WALUBI). Sosialisasi ini telah menjangkau khalayak sebanyak 434.800 orang pada tahun 2018 dan 180.600 orang pada tahun 2019.

TWITTER @RUDIANTARA_ID, SUDAH FOLLOW belum?

Media Sosial apa sih yang paling digemari warganet se-Indonesia? Twitter? Facebook? Instagram? Kalau menurut Chief RA (sapaan hangat Menkominfo) sih Twitter. Eits, ini katanya di tahun 2014 lho. Ia menganggap Twitter adalah media sosial yang saat itu paling representatif digunakan sebagai akun official-nya mengawali karir menjadi Menteri Kominfo pada bulan Oktober 2014 lalu.

Bagaimana kiprah Chief Rudiantara di jagad dunia per-Twitteran? Yang jelas, kesibukan dan jadwal kegiatan yang sangat padat merayap seperti kemacetan Kota Jakarta ini membuat Chief RA tidak bisa terlalu terikat atau engage ke dalam dunia maya terutama media sosial. Sama seperti account official lainnya, Chief RA juga punya seorang administrator yang bertugas untuk membantunya dalam mengelola akun Twitter @rudiantara_id.

Namun, bukan berarti apa yang selalu di tweet oleh akun @rudiantara_id adalah ide administratornya lho. Apa yang tertulis ke dalam akun official tersebut merupakan buah pemikiran Menkominfo Rudiantara itu sendiri. Jadi, tugas utama adminnya yaitu sekadar membantu menaikkan tweet atau mengeksekusi apa yang ingin Chief RA tulis ke dalam cuitan digitalnya. Tugas lain adalah monitoring dan melaporkan jika ada mention atau pesan penting melalui DM untuk Chief. Bahkan agar lebih praktis, sering sekali laporannya sudah dalam bentuk tangkapan layar.

Apabila ditelisik kembali ke timeline-nya, akun twitter @rudiantara_id memang terlihat memiliki karakter komunikasi satu arah. Jarang sekali akun ini terlihat membalas atau merespon mention maupun ReTweet dari followersnya yang sudah mencapai angka 74,2 ribu. Di samping kegiatannya yang sangat padat, Menteri Kominfo Rudiantara memang lebih menyukai komunikasi dua arah melalui private line seperti telepon.

Chief RA tidak ingin ada 'bola liar' di media sosialnya, sehingga apabila ada permasalahan yang bisa segera diselesaikan, beliau lebih memilih untuk menelpon warganet yang melaporkan permasalahan terkait kebijakannya melalui akun twitternya. Contohnya, saat itu Chief membaca sebuah tweet dari salah satu anggota Ombudsman Indonesia tentang kebijakan registrasi kartu Prabayar. Saat itu juga, Chief langsung menelepon orang yang sudah me-mention di twitter untuk mengklarifikasi duduk permasalahannya. Voilaaa, saat itu juga masalah langsung selesai.

Cerita unik lainnya lagi yaitu saat bencana gempa di Palu. Lokasi Chief Rudiantara saat itu sedang menghadiri kegiatan wayangan yang didukung oleh Kominfo di Magetan, Jawa Tengah. Namun, seketika mendengar bencana alam gempa menimpa Kota Palu, Menteri Kominfo langsung bergegas kembali ke Kota Solo untuk segera berkoordinasi memastikan kondisi jaringan seluler di titik-titik lokasi gempa. Dalam mobil sepanjang perjalanannya menuju Kota Solo, ia sempat mendiktekan perintah dan informasi yang disusun dalam bentuk draft tweet berangkai. Rangkaian tweet ini kemudian sekaligus digunakan sebagai bahan untuk diupload dan disebarluaskan sesegera mungkin dalam berbagai keperluan seperti siaran pers, laporan internal, hingga laporan sejawat di kabinet.

Meski tidak intensif mengelola akun Twitternya, Menteri Kominfo Rudiantara cukup sering me-retweet cuitan yang berhubungan dengannya. Ia juga tak pernah melewatkan hari-hari penting di Indonesia untuk dijadikan bahan tweet-nya. Kalau tidak percaya, follow saja akun Twitter bercentang biru @rudiantara_id!



... follow



Rudiantara ✓

@rudiantara_id

Akun pribadi Rudiantara - RA. Menteri @kemkominfo RI.

84 following 74.4 k Followers



Rudiantara ✓

@rudiantara_id

Di sela-sela Sidang Umum PBB tempo hari, saya bertemu bilateral dengan Menteri Artificial Intelligence (AI) dari UAE, Omar Sultan Al Olama.



Kami membicarakan ketertinggalan pemerintah dibanding korporasi (hampir di seluruh dunia) dalam hal pemanfaatan teknologi seperti AI untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Untuk itu akan diadakan World Government Summit pada akhir tahun 2020 agar gap antara pemerintah & korporasi dalam pemanfaatan teknologi dapat dipersempit.

Menteri Omar juga tertarik dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia, khususnya terhadap ekosistem startup yang sudah menghasilkan 3 unicorns & 1 decacorn yang ditopang oleh pasar yang besar serta khususnya jumlah milenial & tumbuhnya kelas menengah baru.



Rudiantara ✓

@rudiantara_id

Bertemu dg Mas @Anjas_Unjuz ini membuat kita selalu optimistis dlm menyongsong era digital krn kita tak kekurangan inspirasi. Mas Anjas yg mhs Univ Brawijaya ini adlh pengembang aplikasi2 mobile yg berkat sederet prestasinya diundang unt berbicara di Gedung Putih, AS. Hebat.



28 TAHUN DI INDUSTRI TIK ANTARKAN CHIEF RA KE ISTANA

Minggu sore, 26 Oktober 2014, halaman istana tampak ramai dipenuhi awak media yang mengelilingi dua sosok berkemeja putih, berdiri tegak di depan podium. Lalah Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014 - 2019, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sore itu keduanya bersiap mengumumkan satu persatu 34 menteri yang akan bekerja bersama dalam jajaran Kabinet Kerja selama lima tahun ke depan.

Sebelum memanggil nama pertama, Presiden Joko Widodo menyampaikan proses pemilihan susunan Kabinet Kerja ini ia lakukan dengan hati-hati dan cermat. Ia bahkan mengulangi kata tersebut dua kali dalam pidatonya, seolah menegaskan bahwa nama-nama yang akan ia umumkan sore itu benar-benar nama terpilih yang tepat untuk memimpin kementeriannya masing-masing selama lima tahun ke depan.

“Proses pemilihan ini saya lakukan dengan hati-hati dan cermat. Dengan hati-hati dan cermat. Yang kita pilih selain kemampuan di bidangnya juga mempunyai *operational leadership* yang baik, kemampuan manajerial yang baik,” kata Presiden Jokowi.



Rudiantara menjadi nama ke-13 yang disebut Presiden Jokowi sore itu. “CEO dari profesional yang telah memajukan industri telekomunikasi dan informatika”, begitu kata Presiden Jokowi saat mengumumkan namanya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014 - 2019.

Memang, Rudiantara bukan nama asing bagi para pelaku industri telekomunikasi. Karirnya di dunia telekomunikasi dimulai pada tahun 1986, saat ia menjabat sebagai General Manager Pengembangan Usaha PT. Indosat Tbk. Sembilan tahun ia habiskan untuk mendalami bidang pengembangan usaha industri telekomunikasi di Indosat, hingga pada tahun 1995 ia diangkat menjadi Direktur Komersial PT. Telkomsel.

Karirnya melejit ketika di tahun 1996 ketika ia diamanahi jabatan COO PT Telekomindo Primabhakti. Berselang setahun sejak ia memegang jabatan COO, Rudiantara juga dipercaya menjadi Direktur Penjualan dan Pemasaran di PT XL Axiata Tbk.

Kepiawaiannya dalam kepemimpinan membuatnya diakui di dunia industri. Tak hanya bidang telekomunikasi, Rudiantara pun membuktikan kemampuannya di industri semen dan pertambangan, dengan menjadi Wakil Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) pada 2006 dan Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero) di tahun 2008. Lalu di tahun 2010 ia dipercaya untuk menduduki posisi sebagai CEO di dua perusahaan sekaligus, yaitu PT Bukit Asam Transpacific Railways Transportation yang bergerak di bidang angkutan batu bara dan PT Rajawali Asia Resources Investment Company.

Hingga di 2011, Rudiantara kembali melanjutkan karirnya di dunia telekomunikasi dengan menjabat sebagai Komisaris Independen & Kepala Audit Committee di PT Telekomunikasi Indonesia



MIMPINYA,
**INDONESIA
MERDEKA
SINYAL
2020**



(Persero) Tbk. Tak hanya itu, 2012 pun ia dipercaya sebagai Komisaris Independen PT Indosat Tbk, sebelum akhirnya menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika pada Oktober 2014.

Kehadiran Rudiantara dalam jajaran Kabinet Kerja disambut baik oleh para pebisnis telekomunikasi. Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi

Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan optimis bahwa di bawah kepemimpinannya, industri telekomunikasi dan informatika akan semakin sehat. “Pak Rudiantara terbukti orang yang sangat mengerti industri, mau berkotor tangan dalam menyelesaikan masalah dan sangat praktis. Saya yakin industri akan semakin sehat ke depan,” katanya, dikutip dari

artikel kompas.com berjudul Industri Telekomunikasi Sambut Positif Rudiantara Jadi Menkominfo pada 27/10/14.

Dukungan lain datang dari Director Innovation & Strategic Portfolio Telkom, Indro Utoyo. Menurutnya Menkominfo harus bisa membenahi pola parenting pemerintah untuk akselerasi pembangunan dan pemanfaatan ICT,

khususnya era *broadband* serta penguatan *cybersecurity* di era digital, sebagai upaya menjaga kedaulatan informasi dari serangan *socio-cultural* dan sistem informasi. Pemerintah juga diharapkan menjadi katalis. “Artinya memberi tugas kepada industri atau pemain utama menggelar dan membangun *broadband ecosystem*, pemerintah memberi dukungan bagi 3A: Availability, Accessibility, dan Affordability,” ujar Indra.

Optimisme dari para pelaku industri ini tidak berlebihan. Terbukti dalam perjalanannya sebagai Menteri, Rudiantara masuk dalam jajaran *GlobeAsia-Power 50 New Leaders Making a Difference* versi *Globe Asia*. Karir panjang di sektor telekomunikasi, keterampilan manajerial, serta pemahaman atas pasar dinilai *GlobeAsia* mendukung keberhasilan Menteri Rudiantara dalam membawa perubahan di

ASN HARUS UBAH POLA PIKIR & PROSES BISNIS



sektor komunikasi dan informatika.

Menurut *Globe Asia*, sebagai Menteri yang menangani sektor komunikasi dan informatika, Rudiantara menghadapi tantangan besar dalam menghadapi sisi buruk keberadaan media sosial seperti ujaran kebencian, hoaks, dan konspirasi politik. Di saat yang bersamaan, ia juga bertanggung jawab untuk membangun ekosistem digital di Indonesia, terutama dalam penyusunan kebijakan *e-commerce* nasional dan pengaturan telekomunikasi serta internet.

Pendekatan yang ia pilih untuk menjadi fasilitator dan akselerator, ketimbang sekedar menjadi regulator pun membawa Kementerian Kominfo bisa membangun ekosistem digital dan memfasilitasi kelahiran start-up digital baru.

Sebelumnya, di tahun 2017, *GlobeAsia* juga menyematkan penghargaan sebagai warga Indonesia yang paling berpengaruh. Dalam laporan *GlobeAsia Power 50: The Most Influential Indonesians in 2017*, Rudiantara dinilai mampu membangun kebijakan *e-commerce* dan secara solid membawa Indonesia menuju era baru komunikasi.

Tak hanya itu, Kementerian Kominfo di bawah kepemimpinan Rudiantara juga didaulat sebagai penanggung jawab proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha kategori Proses Transaksi Tercepat. Piagam penghargaan tersebut diterima langsung Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam acara *Stakeholders Gathering 2017* yang digelar oleh Kementerian Keuangan, di Jakarta, Selasa (14/03/2017) malam.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Kementerian Kominfo karena dinilai berhasil menjadi lembaga kementerian yang tercepat dalam mengeksekusi Proyek Palapa Ring Paket Barat. Proyek Palapa Ring adalah proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik Nasional yang ditujukan demi pemerataan akses pitalebar (*broadband*) di Indonesia. Paket Barat menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau (sampai dengan Pulau Natuna) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.000 km.



Menteri Rudiantara menyatakan Palapa Ring bertujuan untuk melayani daerah *non-financially feasible* (tidak layak secara bisnis/keuangan), di mana pemerintah berperan menyediakan penjaminan dan merupakan kerjasama Pemerintah Badan Usaha pertama di sektor telekomunikasi.

Transformasi Model Binsis

Di bawah kepemimpinannya, Menkominfo melakukan satu perubahan dasar dalam pemerintahan. Mengubah fungsi pemerintah yang selama ini dikenal “hanya” memberi izin, meregulasi, menjadi fasilitator dan akselerator. Hal ini iaawali dari tugas paling dasar pemerintahan, yaitu penyederhanaan layanan perizinan di Kominfo. “Semakin sedikit regulasi semakin bagus, ada 36 jenis izin sekarang tinggal 5. Saya katakan, saya ngga mau tanda tangan peraturan baru jika peraturan tersebut tidak diikuti dengan penghapusan dua atau tiga peraturan menteri yang lama. Regulasi dibuat sederhana,” ungkap dia.

Saat ditanya kunci keberhasilannya dalam karir dan kehidupannya, Menteri Rudiantara langsung menyebut kekuatan doa orang-orang di sekelilingnya. “Orang tua itu kan bukan hanya ayah dan Ibu kita saja. Tapi juga orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita

tuakan, biar bagaimanapun doanya mereka lebih dekat kepada Tuhan, kepada Allah dari pada kita,” tutur Chief RA.

Tentang keberaniannya dalam mengeluarkan kebijakan, ia menjawab bahwa dirinya juga terkadang takut. “Sebenarnya takut juga sih, tapi karena didukung banyak orang, didukung dari senior maupun tokoh agama, dan karena untuk kepentingan bangsa, jadi harus dilakukan. Sebagai manusia kalau takut pasti punya rasa takut, tapi keinginan untuk berbuat, keinginan untuk menjaga bangsa ini lebih besar daripada rasa takut,” ujar Menteri Rudiantara.

Ia turut berpesan bahwa dalam kondisi apapun, harus tetap mengandalkan Tuhan sebagai jalan bagi setiap manusia. Sebab keberhasilan dalam bekerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas merupakan bagian dari jalan yang diberikan Tuhan.

“Kita tidak usah mengharapkan sesuatu imbalan atau apapun karena kerja itu bagian dari ibadah jadi ikhlas saja, berhasil atau tidak itu orang yang menilai, kita cuman menjalankan,” pesan Menteri Rudiantara.

Catatan Singkat Lis Sutjiati

Staf Khusus Menteri Bidang Project Management Office dan Ekonomi Digital

Banyak program strategis prioritas yang harus saya formulasikan, saya gerakan dan saya kawal. Program strategis yang paling prioritas adalah program untuk merealisasikan janji Presiden dalam visi & misi Nawacita yang terkait dengan lingkup kerja Kominfo. Kunci dari mengkategorikan sebagai program strategis prioritas harus memiliki dampak masif, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Salah satu dari program yang memiliki kriteria tersebut adalah program 1000 Startup Digital, yang embrionya sudah diawali pada tahun 2015. Kenapa dimulai dengan startup digital? Karena dalam petajalan *e-commerce* (yang disusun pada saat yang sama) ditemukan bahwa faktor penggerak ekonomi digital Indonesia adalah:

Faktor Penggerak ekonomi digital Indonesia :

1. Start up Digital;

2. UMKM;

3. Perusahaan-perusahaan yang sudah mapan.



Pada tahun 2015 itu kita belum memiliki gerakan nasional membangun ekosistem digital, Kata-kata “startup digital” saja masih banyak yang belum tahu. Bersama-sama dengan banyak ecosystem players saat itu diformulasikanlah program 1000 Startup Digital untuk membangun kultur technopreneurship di Indonesia dengan menggunakan model inkubasi yg mumpuni di Silicon Valley.

Secara resmi gerakan ini diluncurkan tahun 2016. Setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Silicon Valley tercetuslah keinginan membangun ekosistem startup digital di Indonesia. Keinginan Presiden tersebut disampaikan ke Menkominfo dengan pesan untuk menyiapkan Indonesia menjadi “The Digital Energy of Asia”. Targetnya adalah setiap satu tahun tercipta 200 startup digital secara berkelanjutan hingga 5-7 tahun ke depan. Dalam kurun itu diharapkan Indonesia akan mempunyai 1000 startup digital dalam tingkat *seed capital* dulu. Target tersebut adalah tolak ukur awal yang paling realistis mengingat Indonesia adalah bangsa yang besar. Harapannya adalah akan lahir 1000 startup digital yang berkualitas yang nantinya mampu menggerakkan elemen masyarakat lainnya agar bersemangat membangun startup digital lainnya.

Namun demikian, dalam mengembangkan statup digital Indonesia Pak Rudiantara tidak mau berhenti sampai disitu saja. Maka dilanjutkanlah dengan program Next Indonesia Unicorn (NextICorn). Nexticorn adalah langkah berikutnya untuk mengakselerasi lahirnya *unicorn-unicorn* Indonesia yang baru dari startup-startup berkualitas di seri A & B dengan mempertemukan mereka kepada *world top digital* Venture Capital global dan nasional, agar startup dapat memperoleh pendanaan tingkat lanjutan. Dengan NextICorn Diharapkan nantinya startup-startup Indonesia dapat lebih cepat meraih *value* di mata investor nasional dan global sehingga akan lahir banyak unicorn berikutnya. Saat ini, Indonesia memiliki 3 unicorn, yaitu Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak, plus 1 decacorn, yaitu Gojek. Dengan program ini, Menteri Rudiantara menargetkan di tahun 2020 akan ada lima unicorn dari Indonesia.

Pada level internasional, kita banyak melakukan langkah progresif di kancah *digital economy*. Setidaknya ada tiga tugas yang harus saya kerjakan, yaitu:

1. Mendampingi dan menyiapkan bahan-bahan untuk Pak Menteri yang saat ini menjabat sebagai Board of Governor Digital ASEAN di World Economic Forum.
2. Mengawal program kolaborasi digital transformation dengan Kingdom of Saudi Arabia – SauNesia Digital Collaboration.

Salah satu eksekusi awalnya adalah program Umrah Digital Experience yang bekerja sama dengan bersama 2 unicorn kita (Tokopedia dan Traveloka) dan juga menyelenggarakan program 1000 Startup Saudi.

3. Aktif dalam kegiatan dan diskusi pada G20 Digital Ministers Forum.

Khusus untuk kiprah Indonesia di forum negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia (G20 di poin 3 diatas), Kementerian Kominfo mewakili Indonesia menjadi G20 Digital Economy Task Force (DETF). Dalam forum ini Indonesia mengusulkan inisiatif original dari Indonesia yang akhirnya direalisasikan dalam inisiatif Inclusive Digital Economy Accelerator Hub (IDEA-Hub). IDEA Hub juga diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo pada KTT Pemimpin G20 di Osaka pada Juni 2019.

IDEA Hub adalah platform digital yang bertindak sebagai akselerator untuk mempromosikan model bisnis digital yang inklusif di tiga bidang yaitu:

- 1 **Berbagi ekonomi:** menyediakan akses ke kegiatan ekonomi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang-orang di dasar piramida melalui sarana digital.
- 2 **Inklusi Keuangan:** memberikan akses kepada masyarakat yang tidak memiliki rekening bank ke layanan keuangan melalui sarana digital.
- 3 **Digitalisasi tenaga kerja:** mempertahankan, meningkatkan, dan menciptakan lapangan kerja melalui sarana digital.

Tujuan akhir dari platform G20 IDEA Hub ini adalah untuk akselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan kekayaan dan pendapatan.

Dalam perkembangannya, saat ini sedang dilakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan digital (DE) di negara-negara G20 untuk saling bekerjasama dengan G20 Forum. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperkenalkan model bisnis digital yang

berpotensi meningkatkan ekonomi inklusif dengan cara ikut berpartisipasi dalam mengisi platform IDEA-Hub dengan set data model bisnis digital yang telah terbukti keberhasilannya dalam meningkatkan inklusi ekonomi.

Program Kominfo lainnya yang saya rancang sebagai langkah *strategic* implementasi dari peta jalan *e-commerce* adalah Gerakan UMKM Jualan Online. Dengan gerakan ini diharapkan UMKM kita berkembang dan dapat mendominasi pasar digital untuk mengembangkan perekonomian Indonesia. UMKM Go Online memiliki tujuan untuk membuka peluang pasar baru bagi UMKM di Indonesia baik di ranah regional maupun global. Dengan memadukan sistem penjualan *online* dan *offline*, bisnis UMKM diharapkan dapat menjangkau lebih banyak konsumen dengan harapan meningkatkan potensi penjualan. Keberadaan platform pemasaran online dapat membantu mempertemukan konsumen online dan e-UMKM tanpa harus membuka toko cabang secara fisik.

Saya berharap seluruh UMKM bisa merambah ranah digital dan mendominasi pasar nasional dan internasional. Pada tahun 2018, dengan melibatkan *marketplace* (Bukalapak, Blibli.com, Tokopedia, Shopee, Blanja dan Grab Food) mengupayakan jemput bola untuk mengajak UMKM kita untuk jualan *go online* melalui kegiatan *on boarding* ke *marketplace*.

Event yang telah diadakan oleh Kominfo bekerjasama dengan *marketplace* tahun 2018 antara lain:

- UMKM On Boarding pada acara Relaunching Gerakan Ayo UMKM Jualan Online.
- UMKM On Boarding pada acara Roadshow Ramadhan Express.
- UMKM On Boarding pada acara Grebek Pasar Tahap I
- UMKM On Boarding pada acara Kemitraan dengan multistakeholder
- UMKM On Boarding pada acara Grebeg Pasar Tahap II

Masih banyak program-program lain yang yang tak kalah menarik seperti program Palapa Ring, desa-desa 3T merdeka sinyal



dengan akses internet, Petani & Nelayan Go Online dan lain-lain yang kalau saya bahas di sini akan terlalu panjang. Intinya, apapun yang Pak Menteri “*visioning-kan*”, menjadi tugas saya untuk mencari jalan untuk merealisasikan menjadi program yang *executable* dan *achievable*.

Untuk komunikasi pekerjaan dengan kami, Pak Menteri biasanya diskusi awal, atau melalui pesan WA, atau melalui disposisi atau melalui telepon. Yang jelas apapun penugasannya pasti saya lakukan dengan baik. Pasti bakal selalu ada kendala, tapi pasti juga ada jalan keluarnya. Justru itu menjadi tugas kita sebagai staf khusus beliau. Kita dituntut untuk selesaikan semua masalah dan kendala dengan cerdas serta kreatif. Meski demikian, kalau memang kendalanya ada di luar otoritas saya, maka saya selalu bisa mengeskalasi kepada Pak Menteri. Dalam menyelesaikan masalah, Beliau selalu *seek for detail understanding and facts about the problem, thinks out of the box – creative obedient*.

Dalam proposal *initiative* atau program baru saya rancang namun yang belum pernah ada sebelumnya, ada kalanya Beliau belum sepenuhnya yakin di awalnya. Namun Pak Menteri adalah penganut *benefit of the doubts*. Selagi saya dapat mempresentasikan detail analisis dan data-data yang kuat untuk setiap *business case* yang akan dilakukan. Selanjutnya, Beliau menuntut kita kejar dan pastikan berhasil dengan *constant reporting* terhadap beliau.

Dalam memimpin pak Rudiantara mempunyai type:

1. *Objective and Deliverable Oriented*. Beliau tegas dari awal dan konsisten sampai saat ini: Hanya ada satu visi, misi dan *strategic direction* yaitu visi dan, misi Presiden. Perintah beliau kepada saya sebagai staf khususnya: “*Stay within the corridor and make things happen, & deliver with top notch quality*”. Yang pasti HARUS tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu!
2. *In general* di Kominfo, gaya kepemimpinan bapak: *Leading by mentoring to young generation*, namun *to all top senior leaders Pak Rudiantara is more less interfering but demand result*.
3. *Integrity and creative initiatives are above anything else*.

Dalam menjaga hubungan baik dengan saya, dan bukan dengan saya saja, melainkan juga dengan staf khusus lainnya adalah dengan konsistensi Beliau memberikan kepercayaan kepada kami untuk *total end to end* menangani area masing-masing. *Bring expected result!*

Staf khusus Beliau masing-masing punya reputasi yang baik sebagai profesional yang mumpuni yang telah dibangun belasan tahun secara individu. Jadi Beliau tahu kami masing-masing akan sekuat tenaga menjaga reputasi pribadi sebagai profesional dan tidak mungkin merugikan reputasi profesionalisme diri sendiri. Jadi Beliau relatif tidak perlu sibuk mengawasi para staf khususnya, dan Beliau bisa fokus pada bagian yang beliau tangani. Di mana area atau pekerjaan yang staf khusus harus tangani, beliau sudah yakin benar pasti dikerjakan dengan totalitas dengan integritas dan tuntas, tidak perlu di periksa-periksa oleh beliau. Dari sisi itu, sebagai staf khusus rasanya kami tidak meragukan sama sekali.

Pak Rudiantara memilih staf khusus beliau yang sudah terbukti mumpuni dalam bidang yang beliau perlukan. Saya dan Pak Rudi sudah kenal secara profesional cukup lama. Pertemanan profesional ini di waktu-waktu yang lalu telah terbukti. Satu sama lain kami punya nilai-nilai integritas dan profesionalisme yang sama, dan pertemanan kami memiliki *track record loyal* terhadap misi yang kita sepakati.

Gaya *leadership* Beliau kepada staf khususnya: demand professionalism dan jadi *problem solver* sendiri tapi tetap laporkan langkah-langkah yang akan diambil lewat apa saja, WA pun boleh. Sisanya nggak usah banyak minta izin karena sudah tau koridornya. Cukup laporan saja dan selesaikan.

Menurut saya Pak Rudiantara adalah orang yang *super duper Smart, Top Leaders and Management/ Executive with Highest Integrity, Fair and Kind Hearted*.

Lis Sutjiati

Staf Khusus
Menteri Kominfo Bidang
Project Management
Office dan Ekonomi Digital



Sinergi Pemerintah Melalui Forum Merdeka Barat 9

**Deddy Hermawan,
Staf Khusus Menteri Bidang
Komunikasi dan Media**

Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) berawal dari keresahan pemerintah ketika diseminasi program dan capaian masih dilakukan sendiri-sendiri oleh Kementerian/Lembaga. Kanal dan tema diseminasi juga belum terintegrasi yang menyebabkan gaung diseminasi menjadi tidak masif dan bersifat parsial.

Tepat pada tanggal 5 Maret 2017, FMB 9 yang pertama digelar di sebuah cafe di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Nama Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) sendiri merujuk pada alamat Kantor Kementerian Kominfo yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat 9. Konsep FMB 9 berupa diskusi dengan mengundang media serta menghadirkan narasumber dari top level Kementerian/Lembaga untuk langsung berbicara isu-isu hangat sesuai dengan sektornya.

Dalam pembentukan program ini, cukup banyak tokoh yang berperan memberikan ide, saran, masukan dan kritik dalam setiap tahap pelaksanaannya. Selain Menkominfo Rudiantara yang rajin mempromosikan program FMB 9 untuk dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi di dalam setiap rapat kabinet, tercatat pula nama Rosarita Niken Widiastuti selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, serta Staf Ahli Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik, Deddy Hermawan yang menjadi pembina dalam pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan pengalaman beliau di dunia media.



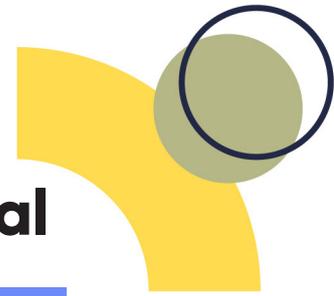
Deddy Hermawan

merupakan Staf Khusus Menteri Kominfo Rudiantara yang menangani Bidang Komunikasi dan Media. Peran Deddy selama era kepemimpinan Rudiantara yaitu sebagai salah satu inisiator Forum Merdeka Barat 9 dan juga mengawal pelaksanaan Narasi Tunggal Kementerian/Lembaga.

- **2008**
Tower Business Unit
- **2008 - 2013**
PT. Excelcomindo Pratama
- **2014 - sekarang**
Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik
- **2016 - sekarang**
Anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara



Imbangi Infrastruktur TIK, Menteri Kominfo Galakkan Pengembangan SDM Era Digital



Dedy Permadi, Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Digital

"*Wasting the brain is a crime*" adalah kalimat yang paling diingat oleh Dr. Dedy Permadi saat pertama kali diajak bergabung menjadi Tenaga Ahli Menteri Kominfo Bidang Kebijakan Digital. Saat itu, Dedy panggilan akrabnya, masih memiliki jabatan struktural di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tak disangka, pada pertemuan ketiga kalinya dengan Menteri Kominfo saat memberi kuliah umum di UGM bulan Oktober tahun 2017, Dedy langsung ditawarkan untuk membantu pekerjaan Chief Rudiantara dalam beberapa hal seperti pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sampai urusan tata kelola era digital.

Salah satu tugas awal yang diingatkannya saat itu adalah membantu merombak skema beasiswa Kementerian Kominfo yang memberikan insentif biaya sekolah S2 bidang TIK ke berbagai negara. Padahal, saat itu Dedy masih fokus mengembangkan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi yang baru saja 'lahir' dan menjadi salah satu program andalan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Meski baru sebentar berkarya di Kominfo, Dedy saat itu juga sempat membantu perumusan kebijakan digital seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) hingga tata kelola *smart city*. Ia juga membantu optimalisasi penggunaan big data mesin AIS Kominfo untuk analisis kebijakan yang dikeluarkan setiap hari untuk tujuan internal pemerintahan.

Merespon pekerjaan yang diamanahkan kepadanya membuat Dedy sadar bahwa Menteri Kominfo memang tidak hanya fokus membangun infrastruktur digital di Indonesia. Ia menangkap pesan kuat bahwa Chief Rudiantara berusaha menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti Palapa Ring dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Maka dari itu, salah satu peraih Doktor termuda di antara Dosen UGM ini membantu mengusulkan kerangka kebijakan SDM era digital yang komprehensif, berkelanjutan, dan tidak parsial.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Era Digital



DIGITAL LEADERSHIP ACADEMY

Advanced Digital Skill

- Chief-Level Practitioner
- Degree Holder
- Expert Level




Digital Talent Scholarship

Intermediate Digital Skill

- Technician Level Worker



SIBER KREASI Gerakan Nasional Literasi Digital #Siberkreasi

Basic Digital Skill - Digital Literacy

- Public in General



Pendekatan kebijakan SDM yang komprehensif tersebut mencakup tiga tingkatan program yang semuanya pada akhirnya dapat diimplementasikan oleh Kementerian Kominfo melalui beberapa satuan kerja. Tiga level ini mencakup seluruh tingkat kecakapan digital, mulai dari level terendah atau *basic*, level menengah atau *intermediate*, hingga level lanjutan atau *advanced*.

Kerangka kebijakan ini tentu disetujui dan didukung penuh oleh Menteri Kominfo Rudiantara. Sebagai contoh, program Digital Talent Scholarship yang baru dibicarakan untuk pertama kali bulan Agustus 2018, langsung dieksekusi oleh Badan Litbang SDM Kominfo pada September 2018. Hal ini menunjukkan perhatian serius Chief RA pada bidang SDM dan disambut dengan sigap dan profesional oleh satuan kerja tersebut.

Basic Digital Skill, Digital Literacy

Gerakan Nasional Literasi Digital #SiBerkreasi berangkat dari kegelisahan berbagai elemen masyarakat terhadap besarnya ancaman potensi bahaya penyebaran konten negatif di dunia maya. Gerakan #SiBerkreasi merupakan kolaborasi berbagai institusi pemerintah maupun swasta, komunitas dan pegiat literasi digital. Gerakan ini merupakan bagian dari komitmen bersama berbagai pihak untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat lewat ajakan untuk berbagi kreativitas lewat konten positif dan memanfaatkan internet secara bijak dan bertanggungjawab.

Menteri Kominfo Rudiantara sangat mendukung program ini sejak pertama kali mendengarnya. Dedy menceritakan, Chief Rudiantara menelepon langsung untuk menyampaikan bahwa ia akan hadir dalam acara peluncuran Siberkreasi pada Oktober 2017, padahal saat itu Chief RA baru bertemu dengannya sekali dan ia juga tidak tahu dari mana beliau bisa mendapatkan nomornya. Beliau terlihat sangat antusias untuk menghadiri kegiatan program yang menurutnya akan sangat berdampak dan berguna untuk diterapkan di Indonesia yang memiliki tingkat kemampuan atau literasi digital yang tergolong masih rendah.

Kini Siberkreasi akan menginjak usia hampir 2 tahun. Memang terkesan masih sangat muda, namun kolaborasi dan gerakan komitmen

bersama yang menysasar pada masyarakat secara umum ini pun pernah mendapatkan Anugerah The World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes tahun 2018. Siberkreasi menjadi salah satu *champion* dari 12 inisiatif karya dari Indonesia dalam kategori “*The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development*”. Saat ini Siberkreasi telah memiliki 103 jejaring lembaga/komunitas dan telah melakukan edukasi *offline* terhadap ratusan ribu masyarakat di berbagai penjuru Indonesia dan melakukan berbagai strategi kampanye online. Siberkreasi juga menginisiasi masuknya literasi digital kedalam kurikulum formal pendidikan dengan menggandeng PGRI untuk memastikan program yang lebih berkelanjutan.

Tak bisa dipungkiri bahwa konten negatif di dunia siber ini semakin masif beberapa tahun belakangan. Chief Rudiantara pun tak sekali dua kali menimpali tiga langkah penanganan konten negatif dari hulu ke hilir. Penanganan dari sisi hulunya yaitu melalui literasi digital kepada masyarakat. Ibarat asupan makanan, Kementerian Kominfo harus memberikan ‘asupan’ yang sehat kepada masyarakat. Dalam konteks ini, produksi konten-konten positif yang biasa dilakukan oleh Siberkreasi untuk melawan penyebaran konten negatif di dunia maya. Intermediate Digital Skill, Digital Talent Scholarship Laporan World Economic Forum 2018 memaparkan Indonesia masih memiliki banyak tantangan dalam menapak Revolusi Industri 4.0. Dari aspek kesiapan teknologi, Indonesia pada peringkat 80 dari 137 negara. Sementara dari aspek efisiensi pasar kerja, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 137 negara. Sementara, secara global laporan dari McKinsey Global Institute (2017) memprediksi pada tahun 2030 sebanyak 800 juta pekerjaan di seluruh dunia akan hilang akibat otomatisasi.

Revolusi industri keempat atau industri 4.0 juga membawa transformasi industri melalui Big Data, Internet of Things, Artificial Intelligence, dan lainnya. Pemerintah Indonesia sendiri, melalui pernyataan dari Presiden Joko Widodo, telah memiliki visi yang jelas dalam mengarahkan ekonomi Indonesia ke era digital baru. Perkembangan revolusi industri 4.0 ini tentunya juga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan perubahan kebutuhan jenis SDM yang dibutuhkan industri.





Untuk menghadapi ini, pemerintah tidak bisa hanya menyediakan akses digitalnya saja. Untuk mengakselerasi pembangunan berbasis industri 4.0 pun, perlu diselaraskan dengan peningkatan kapasitas SDM yang berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan industri.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, salah satu fokus pembangunan nasional Indonesia saat ini mencakup peningkatan kapasitas SDM TIK. Maka dari itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya untuk menyelaraskan hal ini dengan berkolaborasi bersama instansi pemerintahan, sektor privat, hingga institusi pendidikan melalui program Digital Talent Scholarship.

Berawal dari pertemuan dengan salah satu petinggi Microsoft Asia Pasifik, Menteri Rudiantara pun memiliki ide untuk mencari vendor yang bisa membantu mengadakan pelatihan untuk tema-tema terkini dalam era digital. Dari situ lah awal mula konsep program Digital Talent Scholarship yang terus dikembangkan dari 1.000 peserta di tahun 2018, hingga 25.000 peserta pada tahun 2019, dan 50.000 peserta untuk tahun yang akan datang.

Pada level *intermediate* ini, Kementerian Kominfo menasar mengembangkan SDM bidang digital setara pekerja level teknis. Sasarannya pun yaitu generasi muda yang belum memiliki pekerjaan namun sudah menyelesaikan bangku sekolah minimal SMK. Namun, pada tahun 2019 ini, program DTS dikembangkan dengan menasar pada 4 lapisan peserta, mulai dari lulusan SMK/D3/D4/S1/Guru TIK hingga masyarakat umum yang memiliki ilmu *basic* tentang IT.

Advanced Digital Skills, Digital Leadership Academy

Untuk melahirkan calon-calon pemimpin era digital dari sektor publik maupun swasta, Menteri Kominfo Rudiantara juga mengadakan program Digital Leadership Academy (DLA) yang baru saja digelar pada tahun 2019 ini. Tujuannya pun memperkenalkan calon pengambil keputusan era digital ke dalam ekosistem digitalnya langsung.

Dalam program ini para pesertanya akan diajak untuk membuka pikiran dan wawasan mereka seputar ekosistem digital. Mereka akan di 'brainwash' dalam konotasi positif untuk menjadi pemimpin masa depan dalam era digitalisasi ini. Harapannya adalah para pengambil kebijakan

memiliki kapasitas *complex problem solving*, *critical thinking*, *creativity*, dan *managerial skill* yang adaptif di era digital.

Pada tahun ini, para peserta DLA akan diajak untuk mengunjungi dan mendapatkan ilmu di 3 negara yakni Korea Selatan untuk tema pengembangan 5G, Tiongkok untuk tema ekonomi digital, dan Singapura untuk tema smart city. Peserta ini meliputi para pemimpin/pengambil kebijakan baik di sektor publik, sektor privat, maupun dunia akademik.

Pengembangan SDM yang komprehensif

Dari berbagai cerita di atas, Dedy bisa menyimpulkan bahwa salah satu terobosan yang dilakukan Menteri Kominfo Rudiantara selama 5 tahun menjabat adalah ketika beliau mengeluarkan berbagai kebijakan yang didasari pada asumsi bahwa "pembangunan infrastruktur TIK harus dibarengi dan diimbangi dengan pembangunan SDM". Apalagi, infrastruktur Palapa Ring yang juga menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kominfo kini telah rampung 100%. Chief Rudiantara tidak ingin masyarakat Indonesia yang tidak siap berinternet kemudian menggunakannya untuk tujuan negatif. Sebaliknya, infrastruktur TIK harus dapat dioptimalkan oleh publik untuk tujuan positif dan produktif seperti pengembangan ekonomi digital. Dedy yakin bahwa Chief sangat *aware* terhadap isu kesenjangan kecakapan bidang digital ini, sehingga ia selalu mendukung seluruh program mulai dari level paling rendah untuk masyarakat umum hingga level profesional.

"Chief RA tidak hanya sekedar Menteri yang mengurus infrastruktur TIK, tetapi beliau juga Menteri yang memberikan perhatian besar terhadap pembangunan SDM era digital di Indonesia," tutup Dedy Permadi.



Dr. Dedy Permadi,
Tenaga Ahli Menteri
Kominfo Bidang
Kebijakan Digital

GNLD Siberkreasi, Kerja Kolaborasi Tingkatkan Literasi Digital

**Donny Budi Utomo,
Tenaga Ahli Bidang Literasi
Digital dan Tata Kelola
Internet**

Peredaran konten negatif seperti berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*), *cyberbullying*, pornografi, penipuan dan radikalisme di dunia maya menimbulkan kekhawatiran seluruh elemen masyarakat terhadap potensi ancaman terhadap persatuan bangsa. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital terus dilakukan sebagai komitmen Pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.

Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kementerian Sekretaris Negara, Komis Penyiaran Indonesia, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan berbagai komunitas seperti Internet Governance Forum, ICT Watch, PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia), Nawala.org, Indonesia Child Online Protection (ID-COP: ECPAT Indonesia, RAS Foundation dan Yayasan Sejiwa), Internet Sahabat Anak, IWITA Jakarta, ID Talent, Sebangsa, PARFI 56, hingga Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada.

Selain itu dukungan juga hadir dari komunitas Relawan TIK Indonesia, MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), Japelidi (Jaringan Penggiat Literasi Digital), Kumpulan Emak Blogger dan Layaria. Tak hanya itu, dukungan penuh juga ditunjukkan oleh para *influencer* dan *content creator* seperti Marcella Zalianti, Yosi Mokalu (Project-Pop), Marsha Tengker, Dennis Adhiswara, dan masih banyak lagi.

Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi berangkat dari kegelisahan berbagai elemen masyarakat terhadap besarnya ancaman potensi bahaya penyebaran konten negatif di dunia maya. Gerakan Siberkreasi merupakan kolaborasi berbagai institusi pemerintah maupun swasta, komunitas dan pegiat literasi digital. Gerakan ini merupakan bagian dari komitmen bersama berbagai pihak untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat lewat ajakan untuk berbagi kreativitas lewat konten positif dan memanfaatkan internet secara bijak dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi mengajak seluruh elemen masyarakat dan komunitas untuk aktif menyebarkan konten positif di dunia maya.

Dukungan Menteri Kominfo Rudiantara

Dalam Rapat Kerja Kemkominfo bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Rabu (16/01/2019), Menteri Kominfo Rudiantara menyampaikan pencapaian Program Gerakan Siberkreasi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 antusias masyarakat mengikuti kegiatan Siberkreasi cenderung lebih meningkat.

Menkominfo Rudiantara mendukung penuh gerakan Siberkreasi ini sebagai bentuk kerja bersama. "Ini bukan program pemerintah saja tapi juga program perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat. Tidak bisa diklaim yang punya gerakan ini. *Concern* Kominfo adalah merangkul komunitas dan ekosistem untuk menyebarkan konten positif. Jika konten tidak bisa di-*manage* dengan baik akan jadi boomerang," ungkap Rudiantara





Dari data yang dihimpun Kemkominfo, total konten negatif selama tahun 2018 sudah mendekati 1 juta, ada 984 ribu situs yang memuat konten negatif, sementara untuk media sosial yang paling mendominasi adalah Twitter sekitar 531 ribu konten, Facebook 11,700 dan Youtube ada sekitar 3,300 konten.

Pencapaian Kementerian Kominfo dalam meningkatkan budaya literasi melalui teknologi digital ini, juga mendapatkan apresiasi dari Komisi I DPR RI dengan harapan masyarakat harus mendapatkan fasilitas melalui program-program yang telah dijalankan Kemkominfo selama tahun 2018.

Kerja Kolaborasi

Ibarat perjalanan pada padang pasir nan terik dan tandus, ternyata masih dapat ditemui sejumlah oase yang menyediakan ragam asupan bagi para pegiat literasi digital. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 terkait masuknya mata pelajaran informatika ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, adalah salah satu sinyal positif. Peraturan tersebut menetapkan kompetensi dasar yang digunakan sebagai acuan pembelajaran, salah satunya terkait sub-bahasan tentang Dampak Sosial Informatika.

Pada Februari 2019 telah diadakan konsinyering penyusunan bahan ajar informatika untuk tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK yang melibatkan sejumlah guru bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. Inilah langkah awal yang perlu senantiasa dikawal serta didukung,

GNLD Siberkreasi yang diinisiasi bersama pada Oktober 2017 silam tersebut kini telah memiliki jejaring kemitraan tak kurang dari 100 institusi/ lembaga, dengan kegiatan kolaborasi unggulan semisal School of Influencer, Kreator Nongkrong dan Pandu Digital. Selain itu para mitranya pun menggelar sejumlah program mandiri, semisal Smart School Online yang menyediakan sejumlah rujukan edukasi literasi digital secara gratis, melengkapi yang telah disimpan pula pada situs repositori khusus materi literasi digital di laman web literasidigital.id.

Kemudian sejumlah inisiatif akar rumput juga telah hadir terlebih dahulu seperti kampanye Internet Sehat sejak 2002 silam dan Relawan TIK Indonesia yang ribuan anggotanya tersebar dari Aceh hingga Papua. Inisiatif baru pun hadir dari gerakan Pramuka Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Tengah yang memiliki satuan karya (saka) Milenial, dengan dua unggulan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) yaitu Bijak Media Sosial dan Pembicara Literasi Digital.

Kemas Program Isu Hoaks

Sejumlah inisiatif unggulan sebagai medium perilaku konfirmasi (*checking behaviour*) juga telah dilakukan oleh sejumlah pihak. Sebutlah oleh mereka yang berkolaborasi dalam situs jejaring informasi cekfakta.com, stophoaks.id, dan turnbackhoax.id, dengan salah satu motornya dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) yang secara berkala memberikan pembaharuan informasi dan penjelasan tentang beredarnya sejumlah kabar bohong terkini di Internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pun secara mingguan merilis laporan ke publik terkait isu hoaks dan penjelasannya, serta membungkusnya secara kekinian via ikon "Miss Lambe Hoaks" via akun Instagram @misslambehoaks dan kanal YouTube. Ada pula portal informasi yang walau besutan "plat merah" namun berhasil digarap dengan cita rasa "milenial", yaitu IndonesiaBaik.id, hingga dianugerahi penghargaan tertinggi sebagai Winner WSIS Prizes 2017 dari ITU / PBB.

Tentu saja melakukan kerja-kerja kolaborasi *multistakeholder* ini adalah tantangan tersendiri mengingat kompleksitasnya terkait dengan legitimasi pemangku kepentingan, partisipasi dialog, dan efektifitas berikut efisiensi proses (Donny B.U., ed., 2018). Pun mengembangkan dan menyepakati sebuah standar umum yang perlu dilakukan berdasarkan kepentingan bersama, tentu perlu kesabaran ekstra dalam melakukan penghormatan atas kompetensi, karakteristik dan budaya organisasi tiap mitra/pemangku kepentingan (*stakeholder*), pendefinisian peran dan mekanisme yang jelas, transparan dan dapat diandalkan dari setiap stakeholder tanpa terkecuali, kesetaraan kapabilitas (kemampuan) dan kesempatan bagi para *stakeholder* untuk turut dalam dialog

dan perumusan kebijakan, keterbukaan dan akuntabilitas di antara sesama *stakeholder* terkait penyusunan, serta penentuan dan proses kerja bersama.

Para pekerja dan pegiat sektor literasi serta edukasi tentu paham, tidak ada yang instan dalam proses pembangunan kapasitas sumber daya manusia. Ketika berkolaborasi dengan basis *multistakeholder*, sejatinya menuntut kesabaran ekstra. Budaya melakukan dialog dan bahkan debat haruslah dipelihara, sebagai bagian dari pematangan strategi membangun kapasitas sumber daya manusia di era milenial.

Jika di kehutanan kita mengenal istilah reboisasi, atau di kesehatan sangat mafhum kita tentang pentingnya imunisasi, maka di era persaingan informasi tanpa batas ini kita perlu adanya strategi literasi (digital). UNESCO (Nancy Law, 2018) pun memberikan deskripsi yang jelas, bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, berkomunikasi, mengevaluasi, dan membuat informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi dan literasi media. ICT Watch pun telah menawarkan konsep Kerangka Literasi Digital Indonesia, yang terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu perlindungan keamanan pribadi, pemenuhan hak-hak dan pemberdayaan kapabilitas diri (Donny B.U., ed., 2017).

Kerja-kerja literasi, sebagaimana lazimnya kerja di sektor pendidikan, adalah kerja yang menuntut ketelatenan dan kesabaran dengan hasil yang tak dapat dengan instan seketika abrakadabra muncul di depan mata. Mengutip ungkapan dari seorang filsuf Yunani kenamaan, Aristoteles, “*the roots of education are bitter, but the fruit is sweet*”, maka tak ada buah dari kesabaran dalam proses pendidikan selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan. Tetapi juga tidak bisa kita duduk diam berlama-lama, sementara ada ratusan juta pengguna Internet muda yang mengandalkan Internet sebagai salah satu rujukan informasi untuk pengambilan keputusan.

Data pun bicara bahwa dari total 150 juta

pengguna Internet Indonesia, atau sekitar 56% total penduduk Indonesia (Kemp, 2019), mereka yang berusia 19–34 tahun berjumlah sekitar 50%-nya (APJII, 2017). Ini adalah mereka yang juga dapat tergolong sebagai pemilih muda atau muda dalam Pemilu serentak pada April 2019. Demi mereka, demi masa depan Indonesia, kita memang harus bergegas. Bergegas, bukan berarti menjadi gegabah atau grusa-grusu.

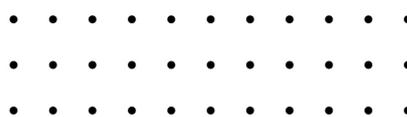
Literasi digital sejatinya adalah kerja bersama pada sisi hulu, membangun kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) masyarakat agar mereka lebih imun terhadap dampak “virus jahat” informasi. Terlebih ketika virus tersebut memang tak dapat serta merta mudah dihilangkan. Adapun untuk menghadapi aktor utama pembuat dan/atau penyebaran hoaks misalnya, tentu adalah kerja-kerja kolaborasi lanjutan di sisi hilir berupa aksi dan langkah penegakan hukum oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum.

Jangan sampai lantaran abai, lengah pun gegabah memaknai inisiatif dan kerja literasi digital ini, kelak harus dibayar sangat mahal lantaran Internet kian dipenuhi-sesaki oleh hoaks, kabar bohong dan ragam hal yang menumpulkan nalar sehat. Maka dapatlah kita kembali pertegas bahwa kerja bersama para pegiat literasi digital Indonesia, adalah kemutlakan tanpa negosiasi. Ini adalah kerja untuk Indonesia yang lebih baik, kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau tidak kita siapa lagi.

Tentang Donny BU

Donny Budi Utomo atau lebih dikenal dengan Donny BU merupakan Tenaga Ahli Menteri Kominfo Bidang Literasi Digital dan Tata Kelola Internet sejak September 2017 hingga sekarang. Sebagai Tenaga Ahli Menteri Kominfo, Donny BU memiliki tugas utama untuk mengkoordinir pelaksanaan komunikasi publik yang berkaitan dengan sosialisasi kebijakan / regulasi TIK serta literasi informasi / digital. Diseminasi informasi secara proaktif kepada masyarakat, media massa dan stakeholder juga menjadi tugas keseharian dari pria yang sehari-harinya juga aktif sebagai Anggota Tim Manajemen Peta Jalan e-Commerce Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Menkominfo Rudiantara, Donny BU menjalankan program literasi





masyarakat yang dikenal dengan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. Bersama Dedy Permadi selaku Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Digital, Donny BU bahu-membahu memberikan program-program literasi kepada masyarakat dalam meningkatkan dan mendorong pemanfaatan teknologi digital secara positif. Tidak berhenti sampai di situ, Donny BU juga melaksanakan kegiatan promosi dan diplomasi Indonesia bidang TIK di ranah global, khususnya di Forum World Summit on the Information Society (WSIS) dan Internet Governance Forum (IGF) yang keduanya masuk dalam rumpun International Telecommunication Union (ITU).

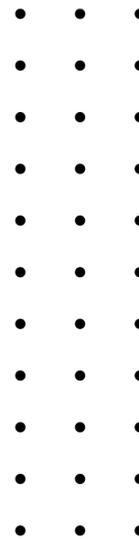
Selama 2 (dua) tahun bekerja bersama Menkominfo Rudiantara, Donny BU banyak mendapatkan arahan yang bersifat strategis dari pria yang akrab dipanggil Chief RA. Arahan strategis dari Chief RA tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya jangka pendek, tapi juga bagaimana program-program yang dijalankan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Banyak masukan dari Chief RA yang bersifat terobosan dalam hal kebijakan atau regulasi untuk mencari solusi dari hambatan yang terjadi di lapangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara pribadi, Donny BU menilai sosok Chief RA sebagai sosok yang bersahaja dan memiliki pemikiran yang strategis namun taktis. Chief RA juga dinilai responsif dalam menanggapi sejumlah isu yang menjadi kepedulian mitra strategis Kominfo maupun masyarakat umum. Dalam aspek pengambilan keputusan pun, Chief RA selalu mempertimbangkan berbagai pihak dengan pendekatan yang relatif *win-win*.

Tak jarang untuk isu-isu yang sangat krusial, khususnya terkait tugas dan fungsi Kementerian Kominfo, Chief RA akan turun langsung memberikan arahan kepada tim terkait. Meski begitu Donny juga menyampaikan bahwa tentu ada pro-kontra atas kebijakan Chief RA, sebagai konsekuensi duduk di jabatan yang membidangi tata kelola internet, di mana dinamikanya sedang berkembang, tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia.



Donny BU
Tenaga Ahli Menteri Kominfo Bidang
Literasi Digital dan Tata Kelola Internet



Sang “Penasihat Hukum” Menteri

Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M
Staf Khusus Menteri
Bidang Hukum

Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M menyelesaikan program Sarjana (S1) di bidang Hukum Internasional di Universitas Padjajaran, lalu meraih gelar Master of Law in Information Technology and Privacy di John Marshall Law School Chicago, Amerika.

Setelah menyelesaikan studi S2-nya, Danrivanto terlibat secara aktif sebagai Tim Penyusun beberapa Rancangan Undang-Undang, di antaranya RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Selang 3 tahun sejak meraih gelar LL.M in IT Law, ia mengambil gelar Doktor (S3) di bidang Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran. Saat ini ia aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, sekaligus menjabat sebagai Kepala Derpatemen Hukum Telekomunikasi, Informasi, dan Kekayaan Intelektual.

Sebagai Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Hukum, Danrivanto bisa disebut sebagai “penasihat hukum” Menteri. Chief RA kerap berdiskusi, meminta masukan dan pendapat dari sisi hukum dengannya. Danrivanto pun turut mendampingi Menteri Rudiantara dalam pertemuan-pertemuan dengan negara luar untuk menjalin kerja sama, salah satunya saat Menteri Kominfo melakukan kunjungan kerja ke Riyadh, Arab Saudi, pada Juli 2019 lalu dalam rangka Penandatanganan MoU antara Indonesia dan Arab Saudi untuk mendorong ekonomi digital di kedua negara.

Pada 19 Desember 2018 lalu, Danrivanto dilantik Menteri Kominfo menjadi Komite Regulasi Telekomunikasi – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia unsur pemerintah periode 2018 – 2022. Di sela pelantikan, Menkominfo menyatakan bahwa keterlibatan



Danrivanto sebagai anggota KRT – BTRI unsur pemerintah, bersama dengan Direktur Jenderal SDPPI dan Direktur Jenderal Aptika, akan memperkuat fungsi KRT-BRTI karena mampu menginterpretasikan regulasi hingga sisi konsumen layanan telekomunikasi.

Danrivanto memiliki segudang pengalaman di bidang hukum dan telekomunikasi, antara lain sebagai Ketua I Dewan Konsumen (Customer Board) Divisi Regional III Jawa Barat & Banten PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., Senior Research pada Pusat Studi Cyberlaw Universitas Padjajaran, Associate Lawyer pada Makes & Partners Law Firm Jakarta, serta Executive Director AVIACOM Indonesian Center of Telecommunications Law Studies.

Buah pikirannya tentang hukum dan industri teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia tertuang dalam buku dan berbagai publikasi penelitian, di antaranya buku Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi, buku Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016 yang ia terbitkan di tahun 2018, penelitian The Virtual Jurisdiction to Combating Cyberterrorism in Indonesia, BIG DATA Virtual Jurisdiction & Financial Technology (Fintech) in Indonesia, Cyberlaw dan Revolusi Industri 4.0, serta The Indonesia Telecommunications Regulations: Privatization and Open Competition.

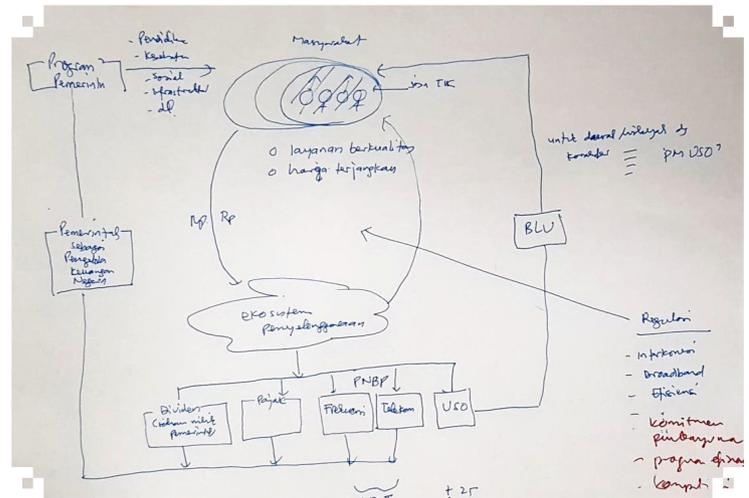


Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M
 Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Hukum



Chief RA dan Coretan Mindmap-nya

FX Bambang Irawan
Tenaga Ahli Menteri
Bidang Media Sosial



**Dokumentasi asli coretan Menteri Rudiantara

Barang bukti terlampir menunjukkan cara Chief RA yang khas untuk memberikan brief dalam pekerjaan. Setiap kali menjelaskan sesuatu, kertas dan *ballpoint*, spidol dan *whiteboard*, adalah kanvas favorit untuk menggariskan ide dan gagasan.

Ada setidaknya dua kemudahan penting yang saya peroleh dari metode tersebut, yaitu tentang *mind map* dan detail. Dengan *mind map* saya mendapat gambaran konteks dan alur berpikir, sehingga tidak sekadar menebak-nebak. Ditambah dengan *break down* informasi yang detail, maka praktis saya punya keywords yang dengan cepat bisa dikembangkan. Apalagi dengan bantuan segala tool digital kekinian.

Hal itu dilakukan di manapun. Pernah suatu ketika kami sedang berada di sebuah pulau kecil nan indah dengan angin sepoi-sepoi di Sulawesi Tenggara, Pulau Bokori namanya. Dengan pasir putih

dan angin sepoi-sepoi pada siang yang terik, maka tak pelak lagi tempatnya asyik untuk dinikmati dengan cara leleh-leleh. Namun Beliau tak melewatkan kesempatan itu untuk tidak meraih map bening yang di dalamnya berisi kertas-kertas dan mulai mencoret-coretnya untuk saya kerjakan dan revisi. Hal yang sama juga sering terjadi di tempat makan, di rumah makan atau warung, waktu luang selalu digunakan untuk menyusun atau merevisi naskah.

Kebiasaan itu menunjukkan juga bahwa Chief RA memang tidak sekadar melempar

order-order yang tak jelas dan komplain setelahnya, namun ikut terlibat dari awal dengan memberi rambu-rambu yang jelas. Sama halnya ketika tiba waktunya melihat hasilnya, maka Chief RA melakukannya dengan sangat teliti, terutama dalam hal naskah yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Oleh sebab itu saya sering bercanda dengan teman-teman wartawan, saya minta mereka agar sekali-sekali mengajak Chief RA untuk menjadi editor di redaksi mereka, niscaya editan akan beres. ***



FX Bambang Irawan
Tenaga Ahli Menteri Kominfo
Bidang Media Sosial

Di Balik Layar Kesibukan Sang Menteri

Rika Sartika, Sekretaris Menteri



Tumpukan surat masuk beserta disposisinya di meja seorang Sekretaris Menteri mungkin bukanlah suatu hal yang aneh. Dering telepon di mejanya pun berbunyi hampir setiap jam. Pertanyaan “Jadi, Pak Menteri bisa hadir atau tidak, Bu?” mungkin sudah bosan didengarnya.

lalah Rika Sartika, Sekretaris Menteri Kominfo yang tak kenal lelah mendampingi Chief RA selama 5 tahun ini. Surat demi surat, email demi email dibacanya dengan teliti agar jadwal kegiatan pimpinan Kementerian Kominfo tidak ada yang ‘bertabrakan’.

Lima jadwal acara dalam satu hari untuk Sang Menteri adalah hal yang lumrah bagi Rika. Terlalu banyak request kehadiran sang maestro kebijakan digital ini membuatnya harus sabar, mengagendakan sesuai jadwal kosong Menteri Kominfo selama beberapa bulan ke depan. Jangan heran kalau jadwal bermain Chief RA bersama cucu saja harus diagendakan. Di sela padatnya pekerjaan Sang Menteri di akhir pekan, Rika harus bisa menyisipkan waktu pribadi seperti pertemuan keluarga, menghadiri pernikahan, hingga jadwal membaca buku seorang Menteri Kominfo.

Kenapa semua ini harus diagendakan? Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu, bahkan membuat takjub. “Pak Menteri itu kalau tidak kerja bisa sakit. Nggak suka dia kalau tidak kerja sehari saja,” ucap Rika kala menjelaskan tugas sehari-harinya yang juga harus menyiapkan makanan ringan bersama vitamin agar pimpinannya itu tidak jatuh sakit karena rutinitasnya yang padat.

Rika pun harus bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan para ajudan, pengawal Menteri, protokoler, hingga tim khusus Menteri yang selalu mendampingi Rudiantara ke mana pun berada. Pasalnya, tanggung jawab Rika sebagai Sekretaris harus membuatnya standby di kantor saja. Jadi, selama 5 tahun, bisa dihitung dengan jari kehadirannya mendampingi Menteri Rudiantara dalam agenda pimpinannya tersebut.

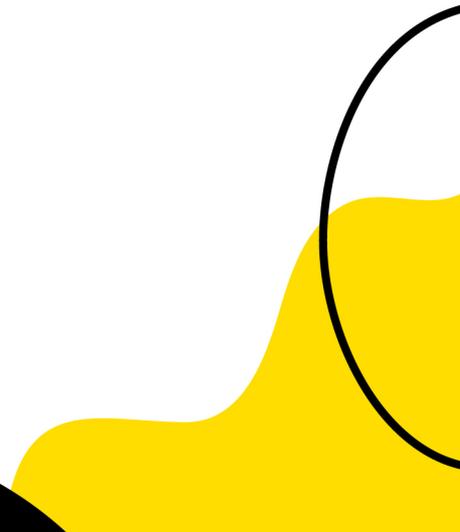
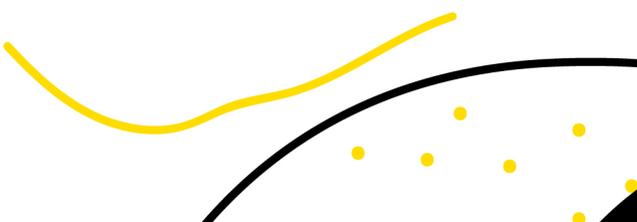
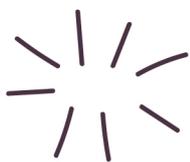
Ya, sekretaris Chief RA yang hanya seorang ini memang tangguh, tak pernah berhenti menjadi time keeper dalam keseharian Sang Menteri. Waktu khusus untuk memberikan disposisi persuratan juga sudah diatur dengan ketat oleh Rika. Maka dari itu, pulang ke rumah ketika matahari belum terbenam saja menjadi hal yang sangat mahal bagi Rika. Apabila jadwal Menteri di kantor belum selesai, haram hukumnya bagi Rika untuk pulang duluan ke rumah.

Padatnya jadwal Sang Menteri membuat Rika enggan menerima undangan untuk ke luar kantor. Jangankan ke luar negeri, agenda ke luar kota saja tidak menjadi tawaran menarik bagi Rika. Sampai suatu ketika, justru sang Menteri Rudiantara lah yang meminta sekretarisnya itu pergi berlibur untuk piknik.

Rutinitas sehari-harinya sebagai juru kunci agenda Menteri, serta dedikasinya kepada Chief RA, membuat Rika disegani banyak orang. Bagaimana tidak, siapa yang berani memberikan perintah melaksanakan tugas Menteri Rudiantara selain Jokowi, Jusuf Kalla dan dan.. (*isi sendiri ya*).



Rika Sartika
Sekretaris Menteri



DEWAN PERS

CHIEF RA DAN MERAWAT KEMERDEKAAN PERS

PROF. DR. IR. MOHAMMAD NUH, DEA

Ketua Dewan Pers Periode 2019 - 2022 — Menteri Koinfo Periode 2007 - 2009

Saya mengenal Pak Rudiantara sudah lama sebelum saya jadi menteri, kenal karena sama-sama komisaris di Semen Indonesia, Semen Gresik waktu itu. Waktu itu saya menjabat sebagai Rektor di ITS, sementara Rudiantara ada perusahaan yang ikut di situ (Semen Indonesia, red.), dari situlah saya mulai mengenal. Beliau memiliki visi bisnis bagus karena memang beliau orang bisnis, orang perusahaan yang bergerak lama di situ. Kaitannya dengan pengembangan yang sekarang ini, di era digital ini, tidak bisa ditafsirkan satu aspek tapi multi.

Dari situlah beliau mempunyai suatu gagasan yang sangat bagus terkait memanfaatkan digital teknologi yang bisa menyejahterakan masyarakat, dengan cara menumbuhkan bisnis yang semua lini dapat ditopang oleh digital teknologi atau ICT.

Yang kedua saya dan Pak Rudiantara juga pernah sama-sama menjabat Ketua Majelis Wali Amanat (MWA). Beliau sekarang Ketua MWA di Padjadjaran, saya Ketua MWA di ITS. Jadi ketemu lagi. Setelah itu saya jadi Ketua Dewan Pers, beliau Menteri Koinfo, nyambung lagi, jadi *wallahu'alam* ketemu ada saja itu. Banyak persamaan kesempatan pertemuan saya dengan beliau.

Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau pekerja keras dan menguasai tren-tren kekinian terhadap teknologi digital. Anak masa kini, meskipun usianya bukan milenial tapi perilakunya perilaku milenial. Ini lebih bagus daripada usianya milenial perilakunya old.

Saya berharap apa yang sudah diikhtiarkan oleh Pak Rudiantara Menkominfo selalu memberikan pemanfaatan, bukan bagi si A, si B, tapi bagi bangsa dan negara.

Rudiantara dan Dewan Pers

Prinsipnya, sama siapa pun yang akan mengelola dunia pers, kata kunci yang tidak boleh dilupakan yaitu kemerdekaan pers, sebagai bagian dari pilar demokrasi. Demokrasi tidak akan bisa berjalan dengan baik atau berkualitas kalau tidak ada *check and balances*. *Check and balances* itu tidak bisa diserahkan orang per orang, karena orang per orang itu usianya tidak lebih lama daripada dengan sistem.

Itu harus dilembagakan. Dewan Pers punya tugas untuk merawat, menjaga, memastikan kemerdekaan pers. Cuma saya tambahkan lagi: kemerdekaan pers yang berkualitas. Syaratnya apa supaya kemerdekaan berkualitas? Yang pertama, para jurnalis harus punya kompetensi yang bagus.



Mohammad Nuh
Ketua Dewan Pers
Periode 2019 - 2022

Program Dewan Pers salah satu di antaranya *upgrading, updating*, meningkatkan kompetensi, sertifikasi dari wartawan atau jurnalis. Tapi itu saja tidak cukup. Yang harus kita lakukan supaya kemerdekaan pers berkualitas tumbuh dengan baik dan *high quality*, yaitu perlindungan.

Wartawan atau jurnalis harus kita beri payung perlindungan supaya nyaman. Kalau tidak ada perlindungan, bilang begini kriminal, sehingga orang masuk dalam wilayah ketakutan. Kalau ketakutan ya tidak bisa keluar dengan nyaman jadi atmosfernya tidak kondusif.

Oleh karena itu, kita tingkatkan kualitas orangnya, lalu kita berikan perlindungan payung. Kalau ada persoalan tentang pemberitaan tidak lari ke kriminal atau pidana, tapi larinya dengan Undang-Undang Pers tahun 1999.

Itu saja belum cukup, kesejahteraannya. Jadi kompetensinya bagus, merasa nyaman karena ada perlindungan, tapi yang dimakan juga ada. Di situlah kita harapkan produk jurnalistiknya, yang saya ibaratkan seperti oksigen. Semua

orang butuh informasi. Semua orang butuh oksigen tapi kalau oksigennya seperti yang di Riau sekarang, terkontaminasi. Informasi pun juga begitu.

Informasi kalau tidak *pure*, ya kontaminasi. Akibatnya kalau kita hirup bukan tambah sehat tapi tambah sakit karena oksigen yang kita dapat kontaminasi, informasi yang kita dapat *biased*. Yang tak kalah penting adalah setiap orang Indonesia harus punya peran, harus punya kemampuan untuk melakukan *self censorship*.

Mencerdaskan masyarakat merupakan kata kunci. Kalau masyarakatnya cerdas dan dewasa, maka aman. Tapi kalau masyarakatnya tidak bisa apa-apa, berita apa saja dipercaya. Sekaligus juga menumbuhkan *critical thinking*. Jurnalis itu harus punya sisi kritis. Kalau tidak punya daya kritis, apa yang mau diperbaiki? Nggak tahu dia, hanya fungsi memberitakan.

Pak Menteri memberi perhatian terhadap menjaga independensi. Jadi kenapa orang masih mau mengadu ke Dewan Pers kalau dia berselisih? Karena masih dianggap independen. Begitu kita tidak independen, selesai sudah.



DEWAN PERS

CHIEF RA DAN PERUBAHAN WAJAH KOMINFO

YOSEP STANLEY ADI PRASETYO

Ketua Dewan Pers Periode 2016 - 2019

Pada awalnya, jelas Menteri Kominfo Rudiantara, tak mengenal saya. Mungkin Chief RA, begitu saya dan teman-teman memanggil Pak Rudiantara, semula mengira saya di beberapa acara hanyalah bagian dari gerombolan wartawan yang suka berdiri di depan pintu untuk melakukan wawancara cegat pintu (*door stop interview*).

Saya bisa memaklumi hal itu karena Chief RA berasal dari dunia bisnis yang mungkin awam dengan belantara dunia wartawan. Padahal pada berbagai kesempatan sejak 2013, saya selalu mendampingi Profesor Bagir Manan. Maklum sejak 2013, saya bersama 8 orang lain diangkat Presiden Susilo Bambang Yudoyono menjadi Anggota Dewan Pers 2013-2016. Pada periode tersebut Pak Bagir Manan yang memasuki periode kedua sebagai anggota Dewan Pers secara aklamasi dipilih untuk menjadi Ketua lagi. Saya ditunjuk untuk jadi Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, merangkap Wakil Ketua di Komisi Pengaduan Dewan Pers.

Selama Dewan Pers periode 2013-2016, saya tak banyak berinteraksi dengan Chief RA maupun Kominfo, karena semua urusan ke luar ditangani langsung oleh Pak Bagir Manan dibantu Kepala Sekretariat Dewan Pers yang notabene adalah ASN dari Kominfo. Pada beberapa acara Dewan Pers pun, baik nasional maupun internasional, di mana Menteri

Kominfo semestinya menyampaikan sambutan tapi digantikan oleh Dirjen IKP Kominfo Bu Niken Rosarita Widyastuti yang sebelumnya adalah Dirut RRI. Jadi kami tak pernah bertemu.

Interaksi saya dengan Chief RA secara tatap muka langsung adalah saat semua anggota Dewan Pers Periode 2012-2019 datang ke kantornya untuk berpamitan. Interaksi berikutnya adalah saat acarapisah sambut antara Dewan Pers Periode 2013-2016 dengan Dewan Pers Periode 2016-2019 pada Kamis, 07 April 2016 di Hotel Sari Pan Pacific. Acara malam itu dimulai dengan makan malam bersama. Chief RA dikabarkan akan datang terlambat karena masih harus rapat di kantor kementerian.

Saya, Pak Bagir Manan dan para anggota Dewan Pers lama maupun yang baru berbaur dengan tamu sambil ngobrol dan bercanda. Tiba-tiba Kepala Sekretariat Dewan Pers, Bu Lomongga Sihombing membisiki saya bahwa Pak Menteri Kominfo sudah meluncur dengan mobil dari Medan Merdeka Barat. Mengingat jarak antara Medan Merdeka Barat ke Hotel Sari Pan Pacific cukup dekat, maka dalam hitungan menit Pak Menteri akan tiba.

Saya sebagai Ketua Dewan Pers yang baru terpilih, dan Pak Bagir Manan sebagai Ketua Dewan Pers yang akan kami lepas, beserta para anggota lama dan baru diminta turun ke lobi untuk menyambut Pak Menteri. Seperti biasa malam itu Chief RA

begitu turun dari mobil langsung menyapa dan menyalami semua orang. Tentu saja yang disapa pertama adalah Pak Bagir. Kami semua lantas naik ke ruangan tempat acara dengan menggunakan lift. Saat berada di ruangan acara saya memilih duduk di dekat Ketua Dewan Pers Independen yang pertama, Atmakusumah Astrasubrata.

Barulah ketika acara dimulai, saya dan Pak Atmakusumah oleh MC diminta duduk di sebelah kanan Chief RA dengan diperkenalkan sebagai Ketua Dewan Pers yang baru, yaitu Dewan Pers Periode 2016-2019. Kami mengobrol sejumlah hal. Beberapa hari setelah acarapisah sambut itu, Chief RA memenuhi janjinya datang ke kantor Dewan Pers. Bersama anggota Dewan Pers lain dan Kepala Sekretariat, kami menyampaikan beberapa hal penting termasuk prioritas kerja di mana salah satunya adalah penunjukkan Indonesia oleh UNESCO untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Press Freedom Day (WPF) pada Mei 2017. Saya sampaikan bahwa Indonesia sebetulnya diusulkan menjadi tuan rumah WPF 2014, namun karena tahun itu adalah tahun politik dan terjadi pergantian pemerintahan, maka Indonesia menawarkan untuk menjadi tuan rumah WPF berikutnya. Pada 2015 dalam rapat yang dihadiri wakil dari Dewan Pers, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kominfo, Kemendikbud dan Komisi Nasional Indonesia Untuk UNESCO (KNIU) diputuskan bahwa Indonesia siap untuk jadi tuan rumah WPF 2017. Profesor Dr. Arief Rachman selaku Ketua KNIU yang memimpin rapat mengusulkan agar Dewan Pers yang menjadi *leading sector*, meski

yang bertugas menjawab surat UNESCO adalah Menteri Luar Negeri.

Sejak itu saya lebih sering bertemu dengan Chief RA. Kalau tak sempat, ya berkomunikasi melalui Whatsapp. Baik dalam acara-acara formal seperti Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari, ulang tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRRSNI), Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI, dan terutama tentu saja saat rapat-rapat persiapan hingga pelaksanaan WPF 2017. Saya juga sering sama-sama jadi narasumber di acara yang sama.

Pernah suatu kali pada Oktober 2017, saya diminta menanggapi hasil kajian Tim Dewan Analisis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN) terkait Lanskap Komunikasi dan Media Indonesia Dalam Pusaran Arus Digital Global 2030. Karena saya tahu bahwa prosedur masuk ke kantor BIN di kawasan Kalibata tidak mudah, saya putuskan naik taksi saja. Di tempat acara ternyata pada sesi yang sama Chief RA juga jadi pembicara. Begitu acara selesai kami bubar jalan. Untuk keluar saya harus jalan kaki menuju ke pintu gerbang ke luar dengan melewati perumahan karyawan dan staf BIN. Jarak menuju gerbang keluar lumayan jauh.



Baru ke luar tak jauh dari pagar Gedung BIN, sebuah mobil Toyota Vellfire warna hitam berplat RI 37 menyusul perlahan di samping saya. Pintu jendela terbuka turun, muncul wajah Chief RA. “Mau ke mana? Naik apa?” tanya Chief RA. Saya jawab, “Sudah Chief, saya naik taksi saja.” Begitu Chief RA tahu saya akan balik ke Gedung Dewan Pers, langsung berkata, “Sudah ikut saya saja. Nanti saya antar sampai Gedung Dewan Pers. Kebetulan saya juga menuju Medan Merdeka Barat.”

Tentu saja saya tak dapat menampik tawaran simpatik seorang Menteri. Saya masuk ke mobil dan duduk di sebelah kanan Chief RA. Kami ngobrol ngalor-ngidul. Tak terasa mobil Chief RA sudah masuk ke halaman Gedung Dewan Pers. Saya diturunkan persis di depan pintu masuk Hall Dewan Pers.

Meski perjumpaan saya dengan Chief RA hanya sekitar 3 tahun saja, ada banyak hal yang bisa saya ceritakan tentang Chief RA. Mungkin saya tulis pada kesempatan lain saja. Dalam upaya memerangi peredaran *hoax* kami punya pandangan yang sama. Pers harus bisa menjadi rumah penjernih (*clearing house*). Karena itulah Chief RA mendukung penuh program verifikasi perusahaan pers dan uji kompetensi wartawan yang dicanangkan Dewan Pers. Selain untuk memerangi *hoaks*, juga untuk memerangi praktik *abal-abalisme*.

Yang jelas saya melihat sosok Chief RA adalah orang yang maunya berpikir simpel. Semua

yang rumit harus bisa dibuat mudah tanpa kehilangan substansinya. Termasuk memangkas birokrasi yang panjang. “Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit”. Itulah sikapnya dalam melihat berbagai persoalan. Jangan heran dalam menghadapi isu *hoaks* terkait beberapa kerusuhan, ia memutuskan memperlambat akses media sosial. Cara ini dinilai banyak pihak cukup efektif mencegah *konfiik* agar tak menjadi lebih berskala luas.

Pada dasarnya ia adalah orang yang egaliter sehingga dengan mudah bergaul dengan orang yang baru dikenalnya. Termasuk anak-anak muda. Sebagai orang yang memiliki profesionalisme tinggi dan tak memiliki kaitan dengan partai politik, Chief RA adalah orang yang tepat ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menkominfo.

Profesionalitas dan independensi Chief RA ini yang membuatnya dekat dengan siapa saja. Ia bukan hanya dekat dengan Presiden, tapi juga dekat dengan Wapres Jusuf Kalla. Pada berbagai kesempatan ia kerap diminta mendampingi Pak JK. Termasuk menemani Pak JK naik helikopter saat menghadiri peringatan akbar HUT TNI di Cilegon, 05 Oktober 2017.

Konon Chief RA juga adalah salah satu menteri yang berhasil meyakinkan Presiden Jokowi dalam mengajukan program kerjanya. Salah satunya adalah upaya mewujudkan Palapa Ring. Bagaimana tidak, ketika hampir seluruh kementerian dan lembaga mengalami pemotongan anggaran dengan alasan penghematan, justru

Kominfo mendapatkan banyak tambahan. Chief RA juga berhasil mengubah watak kementerian yang tadinya sarat dengan nuansa partai politik menjadi institusi “pamong”, yang menjalankan fungsi “mengemong” berbagai kelompok masyarakat. Kita bisa lihat bagaimana kebijakannya untuk melindungi, membantu, dan ikut mengembangkan bisnis start-up yang dibuat oleh anak muda. Saya yakin, Chief RA adalah salah satu pembisik utama Presiden terkait visi Indonesia tentang Industri 4.0.

Saya melihat selama lima tahun Kementerian Kominfo di bawah Chief RA juga mengalami banyak perubahan birokrasi. Dari yang tadinya adalah lembaga yang banyak mengatur, menjadi lembaga yang “membantu, mendorong, memfasilitasi”. Dari institusi yang tadinya orang-orangnya berpikir *in world looking*, menjadi kumpulan orang yang *out world looking*. Cara kerja Chief RA cocok dengan Presiden Jokowi; kerja, kerja, dan kerja.

Kominfo di bawah kepemimpinan Chief RA juga banyak melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk membangun pemahaman penggunaan media sosial yang baik agar lebih bermanfaat. Di bawah Chief RA, Kominfo juga berhasil membenahi akuntabilitas penggunaan sumber-sumber dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (BNPB) yang di masa kerap dijadikan sebagai sapi perah oleh kelompok-kelompok politik.

Waktu cepat berlalu, saya sudah menyelesaikan pekerjaan sebagai pimpinan Dewan Pers. Sebentar lagi Chief RA dan Kabinet Kerja I Presiden Jokowi akan memasuki masa demisioner. Kominfo lima tahun ke depan harus terus memainkan peran penting bagi pembangunan bangsa di tengah persaingan global di mana *internet of things* (IOT) akan menjadi peluang sekaligus ancaman. Apalagi lima tahun ke depan kita akan berada pada paruh pertama bonus demografi Indonesia.***



Yosep Stanley Adi Prasetyo
Ketua Dewan Pers 2016 - 2019

Rudiantara dan Semangat Keterbukaan Informasi Gede Narayana

Ketua Komisi Informasi Pusat Periode 2017 - 2021

Sebelas tahun sudah berlalu sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku Badan Publik memiliki kewajiban dalam ikut melaksanakan amanah Undang-Undang ini. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kominfo mendorong terwujudnya *good governance* yang tergambar dari tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan.

Capaian yang telah diraih Kementerian Kominfo dalam hal Keterbukaan Informasi tidak lepas dari sosok Rudiantara sebagai Menkominfo. Melalui kebijakan-kebijakannya, Rudiantara telah membuat terobosan yang berdampak bagi terselenggaranya Keterbukaan Informasi, baik di lembaga yang ia pimpin maupun di lingkup Pemerintahan Jokowi-JK.

Ditemui tim KOMINFONext pada Jumat, 20 September 2019, di Kantor Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana selaku Ketua Komisi Informasi Pusat memaparkan pandangannya atas peran Menteri Rudiantara mendukung pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Indonesia.

Bagaimana peran Menkominfo Rudiantara dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Indonesia?

Bermula dari pengukuhan kami (Komisioner KI Pusat) pada tahun 2017 di sekitar November – Desember, kami bermitra dengan Kominfo, dalam hal ini Pak Rudiantara. Selama periode 2017 sampai hari ini di 2019, saya melihat partisipasi aktif dan konkret Pak Rudiantara

dalam membumikan semangat transparansi dan akuntabilitas. Parameternya yaitu beliau memberikan perhatian kepada Komisi Informasi secara kelembagaan melalui alokasi anggaran yang mendukung program yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi.

Dari sisi kebijakan lain, beberapa hal yang patut dicermati adalah beliau dengan berani menutup akses internet ketika pasca Pemilu, juga baru-baru ini dilakukan di Papua. Dalam ranah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (KIP) memang *debatable*, ada yang setuju dan tidak. Namun dalam UU KIP ada poin pengecualian informasi dengan alasan pertahanan dan keamanan Negara. Basis regulasi condong ditutup, tapi demi keamanan dan pertahanan Negara, harus ditutup. Di situlah terobosan yang dilakukan Pak Rudiantara dalam membuat kebijakan yang harus dilakukan dari seorang *top leader* dan dalam mengambil suatu sikap. Itu kan diperlukan suatu hitung-hitungan dari pribadi Pak Rudiantara.

Bagi Komisi Informasi (menutup akses internet), jelas *debatable*, tapi bagi Pak Rudiantara selaku Menteri Kominfo sebagai pemegang otoritas, sah-sah saja beliau melakukan terobosan tersebut demi pertahanan dan keamanan negara. Implikasi jelas, pemilu selesai dan gesekan pasca Pemilu tidak berkepanjangan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, apakah ada kebijakan spesifik Menkominfo Rudiantara dalam mendorong implementasi Keterbukaan Informasi Publik?

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri dan independen. Sehingga bentuk hubungan kami

dengan Pak Rudiantara yaitu komunikasi dan koordinasi, baik secara langsung dengan beliau maupun dengan jajaran staf di Kominfo. Pak Rudiantara baik setiap saat bisa komunikasi dan koordinasi, dari 2017 sampai sekarang dinilai baik.

Bagaimana Bapak memandang Rudiantara secara pribadi?

Saya berkenalan dengan Pak Rudiantara ketika sudah menjadi komisioner di Komisi Informasi Pusat. Saya sering diundang dalam kegiatan-kegiatan pribadi beliau semisal open house Idul Fitri. Saya lihat disitu yang hadir tidak hanya pejabat, dari masyarakat biasa juga hadir, rupanya beliau komunikatif dengan berbagai kalangan. Dari di situ juga, saya juga bisa menilai sosok Pak Rudiantara ini akomodatif.

Apa pesan Bapak terkait Periode 5 Tahun Kementerian Kominfo di bawah Rudiantara?

Sebagai lembaga, Komisi Informasi didukung dengan ruang yang luas lagi, baik dalam bentuk anggaran maupun sinergi dengan beberapa Direktorat Jenderal di Kominfo. Sinergi ini sudah dirintis dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Ruang itu ke depannya agar diperbanyak dan dikembangkan lagi, Anggaran tidak harus di kita, namun Komisi Informasi dilibatkan dalam bentuk sinergi program.

Catatan lain yaitu berkaitan dengan monitoring evaluasi kepada semua Badan Publik. Kementerian Kominfo sebagai Badan Publik mengalami hal yang lebih baik dibanding sebelumnya. Ada komitmen dari Pak Rudiantara dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Kominfo tahun 2018 mencapai predikat informatif yang menggambarkan kesungguhan dan komitmen dari Bapak Rudiantara.

Ke depannya, semoga Pak Rudiantara sukses, bisa jadi di Kominfo bisa di manapun.



Gede Narayana

Ketua Komisi
Informasi Pusat

Periode 2017 - 2021



DUKUNGAN NYATA CHIEF RA UNTUK PENYIARAN INDONESIA

Siapa yang tak kenal dengan sosok Rudiantara. Nama pria kelahiran Bogor, 03 Mei 1959 ini cukup membumi 4-5 tahun terakhir. Ya, beliau adalah Menteri Komunikasi dan Informatika di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saya, Yuliandre Darwis, Ph.D., mengakui sosok Rudiantara ini di awal kepemimpinannya sangat tegas, lugas, dalam menjalankan program pertamanya sebagai Menteri, yaitu “Reformasi Birokrasi”.

Dalam masa kepemimpinannya, saya sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2016-2019 menilai sosok Rudiantara cukup bijak dalam memberikan pandangannya. Saya dan seluruh anggota komisioner serta karyawan yang ada di KPI Pusat khususnya, merasakan kebijakan serta arahan beliau yang dapat merangsek masuk ke dalam lini KPI ke arah yang lebih baik lagi. Dukungan serta harapan yang beliau tuturkan sangat nyata terasa. Beliau yang mengerti betul dengan arah kebijakan birokrasi menjadi motor semangat kami untuk menjadi regulator yang dapat dicintai oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Sebagai junior, saya selalu menyapanya dengan panggilan “Chief RA”. Predikat Chief ini saya sematkan kepada Rudiantara sebagai penghormatan kepada dedikasi beliau yang tak henti-hentinya mendukung arah KPI dalam menentukan segala kebijakan di wilayah penyiaran Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Chief RA selalu menayakan apa dinamika terbaru yang sedang terjadi wilayah penyiaran kita. Ini menjadi salah satu bukti bahwa Chief RA sangat peduli dengan nasib baik penyiaran Indonesia.

Ingat saya ketika baru menjabat sebagai Ketua KPI 2016-2019, saya sempat meminta arahan serta pandangan beliau untuk memimpin lembaga negara ini. Beliau katakan “Presiden Jokowi memberikan target spesifik dan khusus kepada kami (Kominfo), karena yang terpenting bagi negara ini adalah memetakan program yang paling penting untuk kepentingan masyarakat,”. Ini menjadi sebuah tantangan hebat dalam karir saya yang baru memulai sebagai pucuk pimpinan KPI kala itu.

Sosok Rudiantara juga begitu membekas dalam diri pribadi saya dan keluarga. Momen itu ketika Chief RA bersedia menjadi saksi dalam pernikahan saya dan istri tercinta Ratu Rolinda Rahman. Kala itu, di H - 4 acara, saya belum menentukan siapakah yang akan menjadi saksi dalam pernikahan saya. Saya menginginkan Chief RA untuk menjadi saksi pernikahan, tanpa waktu lama saya coba utarakan niat baik tersebut. Tak disangka, dengan respon yang begitu cepat beliau menyanggupi untuk menjadi bagian dari hari bersejarah dalam hidup saya.

Perasaan bahagia dan senang menyelimuti menjadi satu. Begitu perhatiannya seorang Rudiantara yang pasti sangat sibuk untuk dapat hadir menyempatkan waktu di hari bahagia saya. Sungguh pengalaman ini akan saya kenang dan akan saya ceritakan ke anak cucu saya di kemudian hari.

Sepenggal cerita saya untuk seorang Rudiantara yang dapat saya abadikan dengan kata-kata. Hal yang terpenting dan saya ilhami betul bahwa seorang Rudiantara dapat dijadikan panutan untuk generasi penerus. Saya yakin dan percaya bangsa Indonesia ini dapat maju dan berkembang sampai saat ini berkat adanya kontribusi “Chief RA” di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika.



Yuliandre Darwis, Ph.D

**Komisioner Bidang
Kelembagaan KPI Pusat
Periode 2019 - 2022**

**Ketua KPI Pusat Periode
2016 - 2019**



CHIEF RA: PERUBAHAN INDUSTRI TELKO HINGGA DIGITALISASI

Selama 5 tahun menjabat, Pak Rudiantara membawa banyak perubahan baik untuk industri telekomunikasi dan digitalisasi di Indonesia. Beliau berhasil melakukan pemerataan akses internet yang terlihat dari naiknya pengguna internet setiap tahun. Pada ajang International Telecommunication Union (ITU) Telecom World Budapest 2019, Pemerintah melalui Kementerian yang dipimpin oleh Pak Rudi, mengumumkan bahwa koneksi *backbone* serat optik di semua kota di Indonesia, atau proyek Palapa Ring telah selesai di tahun ini.

Pemerataan akses komunikasi juga dilakukan melalui program dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), dengan membangun BTS-BTS di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Tidak hanya membangun infrastruktur, Pak Rudi juga memimpin kementeriannya untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia agar beradaptasi menggunakan teknologi

dengan baik. Gebrakan beliau telah berhasil mendorong digitalisasi yang ditandai dengan

Ahmad Abdulaziz
Al Neama

CEO Indosat Ooredoo



munculnya banyak *start-up* lokal dan peningkatan transaksi *e-commerce* dalam negeri. Tidak hanya mendorong kemunculan para *start-up*, beliau juga memberikan ruang untuk mereka tumbuh berkembang bahkan ke level internasional.

Digitalisasi Indonesia juga dilakukan melalui Smart City. Indosat Ooredoo berpartisipasi pada Gerakan 100 Smart City yang dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemenkominfo juga tidak luput untuk memberikan sosialisasi penggunaan media sosial yang menjadi tren di Indonesia melalui Gerakan Siberkreasi.

Pak Rudiantara juga sangat dekat dengan Indosat Ooredoo. Beliau menjabat sebagai Komisaris Indosat Ooredoo sebelum menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia masa jabatan 2014-2019. Pada perayaan ulang tahun ke 51 Indosat Ooredoo tahun lalu, Pak Rudiantara memenuhi undangan kami untuk ikut serta mencoba teknologi 5G dengan 3D Augmented Reality.

Di awal masa jabatan, saya sempat bertemu beliau untuk membahas teknologi 5G di Indonesia. Kami terlibat diskusi menarik mengenai bagaimana teknologi ini mampu membawa Indonesia lebih baik lagi. Namun karena memang masih diperlukan waktu untuk menata frekuensi dan ekosistem pendukung lain, perluasan jangkauan 4G lebih menjadi prioritas untuk saat ini.

Penghargaan tertinggi bagi beliau yang telah mencurahkan pemikiran, waktu, dan upaya beliau selama paling tidak 5 tahun ini bagi kebaikan bangsa Indonesia. Insya Allah, Indosat Ooredoo dan kolaborasi seluruh stakeholder akan mampu mewujudkan visi dan menjalankan misi yang Pak Rudi telah canangkan.

Harapan dan doa kami untuk kesehatan dan kesejahteraan Pak Rudiantara. Kami yakin beliau akan terus berkontribusi bagi kemajuan teknologi di Indonesia.





SINERGI KEMENKOMINFO DAN TELKOMSEL UNTUK AKSELERASIKAN NEGERI

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara pernah mengungkapkan bahwa hubungan regulator dengan operator tidak dapat dipisahkan. Pernyataan Bapak Rudiantara tersebut sangat tepat, mengingat upaya yang dilakukan operator seluler baik dalam hal penggelaran jaringan hingga implementasi teknologi digital terkini, tidak dapat dilepaskan dari peran penting pemerintah melalui Kemenkominfo sebagai *policy maker*.

Sebagai operator seluler, Telkomsel berkarya untuk negeri di bawah naungan Kemenkominfo. Dalam upaya menghadirkan kesetaraan pelayanan komunikasi dan kemanfaatan teknologi terkini hingga pelosok negeri, Telkomsel sangat didukung oleh adanya kesamaan visi dengan Menkominfo Rudiantara

Emma Sri Martini

Direktur Utama
Telkomsel



yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi operator seluler untuk terus berinovasi mengembangkan teknologi telekomunikasi bagi masyarakat. Bahkan Rudiantara menyebutkan bahwa telekomunikasi merupakan “sembako” baru.

Di bawah kepemimpinan Rudiantara, Kemenkominfo telah bekerja keras untuk menggelar layanan broadband di seluruh wilayah Tanah Air. Seperti menggalakkan inisiatif Merdeka Sinyal sekaligus menargetkan jaringan 4G dapat menjangkau 100% wilayah Indonesia pada tahun ini. Upaya tersebut Kemenkominfo wujudkan dengan membangun infrastruktur Palapa Ring yang menyentuh seluruh wilayah Indonesia. Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Kemenkominfo, Telkomsel pun telah menambah lebih dari 15.000 unit BTS baru berbasis 4G di seluruh penjuru negeri sepanjang Semester I 2019.

Tidak hanya itu, dukungan dari Menkominfo kembali hadir melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2019. Aturan tersebut mewajibkan penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler untuk melakukan penataan ulang (*refarming*) pita frekuensi radio 800 MHz dan 900 MHz yang sebelumnya terpisah (*non-contiguous*) menjadi berdampingan (*contiguous*). Hal ini merupakan langkah yang sangat tepat dan menjadi motivasi baru bagi operator seluler dalam memberikan kualitas jaringan telekomunikasi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berbekal fondasi regulasi dari Kemenkominfo, Telkomsel sendiri kemudian merampungkan *refarming* pita frekuensi radio 800 MHz dan 900 MHz secara nasional. Dengan begitu, Telkomsel dapat memanfaatkan teknologi LTE 10-15 MHz secara lebih maksimal agar dapat memberikan kecepatan internet yang lebih baik bagi pelanggan di seluruh Indonesia, sejalan dengan misi Kemenkominfo dalam mengakselerasikan perluasan cakupan layanan LTE di seluruh penjuru negeri.

Lebih lanjut, Telkomsel kembali menyambut positif pandangan Menkominfo Rudiantara yang menyatakan bahwa Kalimantan bisa menjadi

‘gerbang’ internet ke atau dari Tanah Air ke dunia internasional. Maka dari itu, kesiapan infrastruktur Telkomsel turut hadir di Kabupaten Kutai Kartanegara (KK) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai calon ibu kota baru Indonesia dan di Pulau Kalimantan secara keseluruhan.

Hingga kini Telkomsel telah menggelar lebih dari 1.100 BTS (67% di antaranya BTS broadband) di Kutai Kartanegara dan lebih dari 220 BTS (68% di antaranya BTS broadband) di Penajam Paser Utara. Secara keseluruhan, Kalimantan Timur adalah provinsi di Kalimantan dengan jumlah BTS terbanyak. Sejumlah 5.500 unit BTS dari 17.800 BTS yang tersebar di seluruh Pulau Kalimantan berada di Kalimantan Timur.

Mengakselerasikan Lahirnya Ekosistem Digital yang Inklusif di Seluruh Indonesia

Kiprah Kemenkominfo di bawah kepemimpinan Rudiantara tidak hanya terbatas pada upaya memberikan kesetaraan akses komunikasi di seluruh penjuru negeri. Tentunya kita tidak dapat melupakan peran Kemenkominfo yang berkomitmen mengakselerasikan perkembangan ekosistem digital yang inklusif di Indonesia. Salah satu contoh nyatanya adalah dengan hadirnya program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital untuk mendorong lahirnya talenta-talenta digital unggul sebagai penggerak ekosistem digital di Tanah Air. Para alumni dari program tersebut pun telah memberikan dampak positif dan nyata di masyarakat, seperti startup Kopitani yang mampu memberdayakan petani-petani kopi yang ada di Indonesia.

Telkomsel pun berupaya untuk dapat terus sejalan dengan upaya Kemenkominfo dengan menghadirkan program The NextDev. Program ini bertujuan untuk memberdayakan startup lokal agar bisa menghasilkan produk digital berkualitas yang mampu mengakselerasikan dampak positif dengan memanfaatkan teknologi digital, dan diharapkan dapat mengamplifikasi dampak sosial yang dirintis Kemenkominfo melalui Gerakan Nasional 1000 Startup Digital.

Ekosistem digital yang inklusif tentunya perlu ditunjang dengan kesiapan Indonesia dalam memaksimalkan ekonomi digital. Maka dari itu, Telkomsel senantiasa berperan aktif membantu Kemenkominfo dalam mendukung inisiatif-inisiatif yang mampu menumbuhkan ekonomi digital di Tanah Air. Seperti partisipasi Telkomsel dan Kemenkominfo yang bersama-sama menghadiri IDByte eSports 2019 yang merupakan wadah dalam menggerakkan gairah e-sports di Indonesia sebagai salah satu industri yang turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air.

Dengan berbagai inisiatif dan regulasi yang telah Kemenkominfo berlakukan di era kepemimpinan Rudiantara, Telkomsel percaya bahwa Kemenkominfo akan terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Seperti pembangunan Palapa Ring untuk mewujudkan kesetaraan akses telekomunikasi di seluruh penjuru negeri dan berlakunya registrasi kartu prabayar sebagai upaya dalam membentuk industri telekomunikasi yang lebih sehat bagi para pelaku usaha serta konsumen.

Semoga sinergi antara Kemenkominfo dan Telkomsel akan tetap terjaga dan semakin solid agar Bersama dapat terus bergerak maju mengakselerasikan negeri mewujudkan Indonesia sebagai negara digital sesuai dengan visi Digital Nation yang dicanangkan oleh pemerintah. Melalui pemerataan jaringan telekomunikasi di seluruh penjuru negeri dan pembangunan ekosistem digital secara menyeluruh dan berkelanjutan, kolaborasi antara Kemenkominfo dan Telkomsel diharapkan dapat terus memberikan dampak sosial positif yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.





PAK RUDIANTARA DAN UPAYA PENYEHATAN INDUSTRI

Sepanjang lima tahun masa kepemimpinan Pak Rudiantara sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) telah terbit dan terimplementasi sejumlah kebijakan yang berkontribusi memajukan industri telekomunikasi nasional. Dalam hal ini, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) juga turut merasakan secara langsung dampak positif dari kebijakan-kebijakan tersebut. Untuk itu, kami tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri.

Lima tahun yang lalu ketika Pak Rudiantara mulai menjabat sebagai Menkominfo para operator sedang mengawali layanan 4G LTE (Long Term Evolution). Bahkan beliau juga turut meluncurkan layanan 4G XL Axiata. Antusiasme Menkominfo terus berlanjut dan ditunjukkan dalam sejumlah kebijakan yang mendorong pengembangan jaringan 4G secara massif di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan yang dimaksud antara lain adalah mengenai penataan spektrum, di mana pemerintah mengalokasikan spektrum 1.800 MHz khusus untuk 4G LTE. Penataan yang dilaksanakan secara cepat dan sesuai jadwal ketika

Dian Siswarini

CEO XL Axiata



ini mempermudah langkah pengembangan 4G selanjutnya oleh semua operator.

Begitu pula dengan kebijakan mengenai penataan kembali frekuensi yang memudahkan setiap operator untuk meng-upgrade teknologi yang diterapkan, misalnya dari 2G ke 3G atau 4G. Kemudahan itu juga memungkinkan setiap operator untuk menyesuaikan teknologi jaringan yang diterapkan di suatu wilayah operasi dengan trafik layanan atau kebutuhan pelanggannya.

Penataan frekuensi yang dimulai pada tahun 2015 tersebut juga berhasil mendorong peningkatan penetrasi layanan telekomunikasi dan data ke berbagai pelosok Indonesia. Hingga saat ini puluhan ribu desa dan kelurahan di semua provinsi telah terjangkau layanan 4G dari semua operator. Khusus XL Axiata, jaringan 4G juga telah menjangkau sekitar 410 kota/kabupaten, atau lebih dari 92% populasi Indonesia.

Harus diakui, selama 5 tahun terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berhasil mendorong perluasan jaringan telekomunikasi dan data berkualitas ke seluruh penjuru Indonesia. Keberadaannya juga telah mampu mendorong pelaksanaan pembangunan nasional di berbagai bidang.

Selain penataan frekuensi di atas, pemerintah juga telah berhasil mewujudkan pembangunan proyek Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Jaringan Palapa Ring ini sangat membantu operator, termasuk XL Axiata, dalam upaya perluasan jaringan data 4G di sejumlah area yang cukup pelosok. Kami sendiri telah memanfaatkan Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Tengah ke beberapa area terluar di Indonesia.

Selanjutnya, kami juga mengapresiasi penuh Kementerian Kominfo terkait perluasan jaringan melalui skema Universal Service Obligation (USO). Proyek pembangunan jaringan USO merupakan terobosan yang memang perlu dilakukan pemerintah untuk mempercepat penyediaan layanan telekomunikasi dan data hingga ke area-area terpencil dan tertinggal. XL Axiata juga turut berpartisipasi dalam proyek USO di puluhan area dan akan berkembang hingga di ratusan titik, termasuk yang masih dalam pengerjaan hingga saat ini.

Pencapaian Pak Rudiantara lainnya yang akan selalu dicatat oleh industri telekomunikasi Indonesia adalah keberanian beliau dalam menerapkan kebijakan tentang kewajiban registrasi nomor Prabayar. Kebijakan ini mungkin tidak populer bagi sebagian pihak, namun kami akui memiliki nilai yang strategis bagi upaya penyehatan industri telekomunikasi. Bagi masyarakat pengguna layanan telekomunikasi seluler di Indonesia, kebijakan mengenai registrasi nomor Prabayar ini juga menjadi upaya pemerintah untuk mencegah tindak kejahatan penyalahgunaan layanan seluler yang sangat mengganggu.

Penyehatan Industri

Peran serta perusahaan operator layanan telekomunikasi dan data dalam pembangunan layanan hingga ke pelosok negeri tidak bisa ditinggalkan. Industri telko nasional yang sehat dan kuat pasti akan mampu memberikan kontribusi yang kuat juga pada pembangunan nasional. Karena itu, sudah sangat tepat jika pemerintah merangkul semua operator dalam menopang pembangunan, dan di saat yang sama juga berupaya membantu penyehatan industri.

Bagaimanapun juga sebagai regulator dan pengambil kebijakan, Kementerian Kominfo yang memiliki kewenangan penuh dalam mengakselerasi antara kebutuhan pelaku industri untuk terus tumbuh, sekaligus merangkul mereka pula untuk memperkuat kontribusi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan data. Sebagai mantan profesional yang pernah lama berkecimpung di industri telekomunikasi, Pak Rudiantara menyadari benar peran strategis para operator selular.

Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan, termasuk beberapa yang telah disinggung di bagian awal tulisan ini, sedikit banyak telah memberikan angin segar bagi operator. Secara bisnis, harus diakui bersama, para operator memang merasakan mulai munculnya iklim usaha yang lebih baik. Kompetisi pun mulai bisa dijalankan secara wajar dan lebih sehat.

Meski demikian, pemerintah diharapkan bisa

lebih maksimal dalam mendorong kesehatan para operator. Meski memang kondisi industri sudah lebih baik, namun para operator masih merasakan langkah yang berat untuk mampu terus tumbuh. Sebagai akibatnya, saat ini tingkat pengembalian investasi (ROIC) masih kecil. Hal ini menghambat investasi di bidang telekomunikasi. Padahal bidang ini dikenal padat modal. Belanja teknologi dan infrastruktur butuh investasi yang sangat besar.

Tanpa adanya kebijakan terobosan di sisi ini, kondisi industri masih akan terus berjalan berat, yang dampaknya akan dirasakan masyarakat dan juga dukungan pada pembangunan. Misalnya saja terlambatnya pemberlakuan regulasi baru menyebabkan kelambanan dalam implementasi teknologi terbaru, juga pemerataan infrastruktur ke semua wilayah Indonesia yang sangat luas ini.

Satu hal lagi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Menkominfo adalah menyangkut kualitas sumberdaya manusia (SDM) di Kementerian Kominfo. Kami melihat, perkembangan teknologi digital yang saat ini berlangsung demikian cepatnya. Untuk itu, kita perlu memiliki orang-orang yang mampu dengan cepat mengantisipasi dan merespon dampak atau konsekuensi yang akan terjadi dari pesatnya kemajuan teknologi tersebut pada masyarakat dan dunia industri.

Akhir kata, kepemimpinan Pak Rudiantara dalam bidang telekomunikasi patut kita apresiasi tinggi. Apa yang sudah diletakkan beliau melalui berbagai kebijakan sudah berjalan dengan baik dan membawa angin segar, kalau memungkinkan perlu ditingkatkan lagi agar bisa memberikan manfaat yang lebih baik bagi semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dan terutama masyarakat Indonesia.



MENJAHIT INDONESIA
DARI PERBATASAN



LEMBAGA
PENYIARAN

ISHADI S.K.

**KETUA ASOSIASI TELEVISI
SWASTA INDONESIA**

Saya tidak pernah kenal Rudiantara pada waktu dilantik sebagai Menkominfo 27 Oktober 2014. Yang saya ketahui dia adalah pakar IT yang tangguh dan berpengalaman di Indosat, Telkomsel dan XL Axiata. Mungkin ini yang diperlukan oleh Presiden Jokowi ketika memilih dia. Seseorang yang paham betul tentang IT, khususnya bagaimana mengarahkan kepada telekomunikasi dari sisi bisnisnya. Semenjak Departemen Penerangan RI dibubarkan oleh Gus Dur ketika terpilih sebagai Presiden RI keempat (1999), setelah Presiden Habibie, praktis pengaturan mengenai media massa dan kegiatan politik lepas dari jangkauan Kominfo.

Kementerian Kominfo berubah fokus kepada pengembangan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Setahun setelah menjadi Menteri, Chief RA, menyatakan pada tahun 2018 seluruh kota dan kabupaten di Indonesia (440 kota/kabupaten), dapat terhubung lewat *broadband*. Selanjutnya program migrasi ke telepon seluler khususnya LTE dapat diberlakukan. Chief RA bekerja cepat. Awal 2018 proyek 4G LTE 1800 sudah terlaksana. Prestasi lainnya adalah penyusunan UU Perlindungan Data Pribadi, Konvergensi serta Regulasi dan Kebijakan terkait dengan masalah pelayanan TIK di seluruh Indonesia.

**RUDIANTARA,
SANG MAESTRO
BISNIS IT KELAS DUNIA**

Menggunakan momentum 17 Agustus 2019, Konstruksi Palapa Ring selesai dibangun. Palapa Ring adalah proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau 34 provinsi dan 440 kota/kabupaten dari Sabang hingga Merauke dengan menggelar total kabel laut mencapai 35.280 KM dan kabel di daratan sejauh 21.807 KM yang mengitari tujuh pulau besar di Indonesia; Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Palapa Ring adalah proyek pembangunan tulang punggung serat optik di seluruh Indonesia, khususnya daerah pelosok 3T (terluar, terdepan dan tertinggal) karena tak menguntungkan secara bisnis swasta. Proyek ini sangat mahal dan tidak menguntungkan dari sisi bisnis. Tapi Rudiantara dengan cerdas mengatasinya dengan program Universal Service Obligation (USO), yang mengumpulkan dana lewat menuntut 1,25% dari total pendapatan seluruh operator telekomunikasi setiap tahunnya.

Pengalaman panjang di dunia telekomunikasi tingkat dunia seperti GM Pengembangan Usaha PT Indosat Tbk, CEO PT Rajawali Asia Resources Investment Company, Direktur Corporate Affairs PT XL Axiata Tbk, Direktur Komersial PT Telkomsel, COO Telekomindo Prima Bhakti dan selusin jabatan prestigious lainnya. Dengan *track record* demikian panjang, menurut saya Rudiantara sangat rendah hati. Saya bisa sewaktu-waktu menelepon untuk minta waktu dan kalau tidak ada rapat atau sedang di luar daerah, Chief RA langsung menyetujui. Pertemuan bisa di kantor, di rumahnya atau di cafe empat rumah di sebelah kiri rumah pribadinya di kawasan Menteng, Jakarta.

Pertemuan bisa berlangsung singkat atau berjam-jam sesuai waktu yang tersedia. Perbincangan menyangkut penyiaran atau soal lainnya, kecuali masalah politik. Chief RA selalu menghindarinya.

Saya pernah berkunjung mendadak ke rumahnya naik sepeda *sport* saat *car free day*. Chief RA menerima secara terbuka meski saya berpakaian *sport*, dia langsung “menyeret” saya ke cafe dekat rumahnya.

Saya suka gayanya dan sikap egaliternya.

Itulah yang saya ketahui selama empat tahun, namun yang tidak terlupakan adalah ketika saya diajak Rudiantara merasakan sebuah “*milestone*”, peresmian jaringan TV Digital pertama di Indonesia, khusus dimulai di daerah perbatasan; Nunukan, Krayan, Pulau Batam dan Jayapura. Sampai sekarang UU yang mengatur penyiaran digital Radio dan TV belum disahkan, masih diberlakukan UU Penyiaran No 32 Tahun 2002, 17 tahun yang lalu. Sementara hampir semua negara di dunia telah melakukan penyiaran radio dan TV digital. Sementara International Telecommunication Union (ITU), sepuluh tahun silam telah mencanangkan tahun 2020 menjadi Analog Switch-Off to Digital (ASO).

Pada kunjungan ke Tarakan-Krayan-Nunukan tanggal 2 September 2019 lalu dijalani menggunakan pesawat ringan berbaling-baling berkapasitas 12 penumpang. Memberi kesan tersendiri, khususnya peresmian TV digital telah dimulai, sementara di wilayah perbatasan, dan Insya Allah di seluruh Indonesia sebelum tahun 2020, waktu yang dituntut oleh ITU, lembaga pengatur arus lalu lintas frekuensi darat maupun satelit di seluruh dunia. Sambil tersenyum Menteri Koinfo Rudiantara menekan tombol merah dan sorak sorai diiringi alunan musik dan sirine, siaran TV digital di mulai di Indonesia. Meski ditubir waktu batas terakhir Analog Switch-Off.





Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di sela-sela prosesi Pelantikan Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019, Senin (27/10/2014) di Istana Negara. Usai pelantikan, Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet perdana dengan ke-34 Menteri Kabinet Kerja tersebut.







Presiden Joko Widodo menyalami Menteri Kominfo Rudiantara yang didampingi istri, Ibu Triana Rudiantara, usai Pelantikan Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019, Senin (27/10/2014) di Istana Negara.



Menteri Rudiantara diikuti jajaran Eselon I berkeliling menyalami satu persatu seluruh civitas Kominfo saat menggelar Halalbihalal 1 Syawal 1440 Hijriah di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Kominfo, Rabu (12/06/2019)







Menkominfo Rudiantara didampingi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, melakukan pertemuan dengan para Pimpinan Redaksi dalam Forum Pemred “Perkembangan Arus Informasi Papua” di Ruang Serbaguna Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (03/09/2019).



Kemesraan Menteri Kominfo Rudiantara dengan istri, Ibu Triana Rudiantara tertangkap kamera, di sela-sela keseruan acara Kominfo Gathering di Bogor, Sabtu (07/09/19).



ia Infrastr

Fai





President of the World Bank Group, Kim Jim Yong, diapit Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, foto bersama dalam acara Indonesia Infrastructure Finance Forum (IIFF) 2017 di Jakarta, Selasa (25/07/2017)



Menteri Komunikasi dan Informatika terpilih periode 2014 - 2019, Rudiantara, menerima penyerahan buku Memori Jabatan dari Menkominfo periode 2009 - 2014, Tifatul Sembiring, saat acara Pisah Sambut di Ruang Serbaguna Kemkominfo, Senin t (27/10/2014)



Kerja Bersama Ekosistem, Percepat Pembangunan Sektor Kominfo



Salah satu visi Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam bidang ekonomi adalah menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada Tahun 2020. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* komunikasi dan informatika terus berupaya memberikan keadilan digital bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik dari sisi pemerataan akses telekomunikasi, peningkatan kualitas SDM, hingga membangun ekosistem digital untuk mempercepat tumbuhnya ekonomi digital Indonesia.

Hal ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan yang terus ditegaskan Menteri Kominfo Rudiantara di berbagai kesempatan, bagaimana peran negara kini menjadi *less of regulator, more of facilitator, even more of accelerator*.

Prinsip ini bukan tanpa alasan. Menurut Menteri Rudiantara, pelibatan ekosistem dan stakeholders memungkinkan adanya percepatan pembangunan sektor komunikasi dan informatika. Menteri Kominfo mengakui ada banyak pembangunan sektor komunikasi dan informatika yang telah berlangsung. Namun demikian masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan bersama.

Upaya Kementerian Kominfo memberikan keadilan digital bagi seluruh masyarakat Indonesia tergambar melalui tanggapan sejumlah mitra kerja dan *stakeholders* yang hadir pada Konferensi Pers Capaian 4 Tahun Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia akhir Oktober 2018 lalu. Berikut kutipan lengkap pernyataan dari para mitra kerja dan *stakeholders* berkaitan dengan upaya pemerintah tersebut.



RAJA DARMIKA, KEPALA DINAS KOMINFO KABUPATEN NATUNA

Sangat luar biasa jika melihat keterbatasan kami sebagai salah satu daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), bahkan tak pernah terpikirkan sebelumnya, bahwa kami bisa menikmati manfaat dari Palapa Ring Barat, selain berbagai BTS yang telah dibangun. Kenapa? Sebelumnya, keluar masuknya data yang menjadi layanan operator dikoneksikan dengan satelit. Kecepatannya abal-abal, meskipun indikator sinyalnya 4G. Dengan Palapa Ring, yang telah digunakan oleh operator-operator, sekarang kami bisa video call dan live streaming dengan lebih lancar.

Akibatnya, banyak daerah lain yang menuntut hal serupa, minta “di-4G-kan”. Saya yakin dengan adanya Palapa Ring Barat nanti operator akan mau berinvestasi membangun BTS di daerah-daerah pelosok Natuna.



TEDDY Y. DANAS, SENIOR VP PT. BANK MANDIRI

Proses pemungutan PNBPN melalui Bank Mandiri untuk sektor Kominfo lebih akuntabel dan real time. Transaksi tiap tahun juga selalu meningkat. Kami terus mendukung dan berkomitmen agar target tahun 2018 tercapai, yaitu 120 ribu transaksi dengan nilai sekitar 19 triliun.



Sumber : economiczone.id





Sumber : linkedin.cm

EVEN ALEX CHANDRA
HEAD OF PUBLIC POLICY & GOVERNMENT
RELATIONS BUKALAPAK

Kominfo telah berperan dengan baik sebagai akselerator, dan telah sangat membantu e-commerce seperti Bukalapak. Saat ini Bukalapak telah memiliki 50 juta pengguna, 4 juta pelapak, 350 ribu mitra yang semua terbantu karena kerja keras jajaran Kominfo yang menyediakan infrastruktur internet di Tanah Air. Demikian juga dengan program-program seperti UMKM Go Online. Tanpa bantuan dan kerja sama dengan Kominfo, kami akan kesulitan menjangkau UMKM di pelosok-pelosok. UMKM lebih terbuka menyambut jika pemerintah ikut di dalam gerakan-gerakan seperti itu. Program UMKM Go Online mempunyai banyak multiplier effect seperti terjadinya perekrutan tenaga kerja, dan terjadinya word of mouth effect.



Sumber : linkedin.cm

PANJI WINANTEYA RUKY,
VP REGULATORY GO-JEK

Kami merasakan banyak perubahan di Kominfo, jika dulu terasa lebih fokus pada penanganan konten, sekarang kami merasakan bahwa lebih banyak pengembangan bisnis yang menciptakan peluang-peluang bisnis, khususnya terasa di sektor kami, yaitu ekonomi digital. Menurut kami kuncinya adalah terjadinya perubahan besar dalam hal mengutamakan pendekatan light touch regulation. Kominfo menyadari bahwa ekonomi digital ini berlangsung dengan sangat dinamis dan penuh inovasi, sehingga membiarkan anak-anak muda berkreasi. Pemerintah hanya menjaga dan mengakselerasinya. Terbukti dengan pendekatan tersebut, kini tercipta 4 unicorn, yang dampaknya langsung terasa, antara lain karena semuanya membuka lapangan kerja baru secara besar-besaran.



Sumber :weforum.org

REYNAZRAN ROYONO, CEO SNAPCART

Saya bersyukur bahwa pemerintah sangat mendorong para startup di Indonesia untuk bisa “ngobrol” langsung dan berkeksistensi dengan bahwa kalau kita mau reach out ke investor maka kita harus reach out diri kita sendiri juga. Kominfo juga mengadakan forum untuk mempromosikan investor dengan startup, seperti yang dilakukan dengan Nexticorn. Nexticorn membuka kesempatan yang sama bagi semua startup, terutama yang sedang fund raising dalam jumlah yang lebih besar, untuk bertemu dengan investor. Mereka jadi bisa lebih fokus ke bisnis daripada sibuk mencari investor sendiri. Pak Menteri sendiri juga melakukan road show ke US, Jepang, Cina, Korea, Australia demi bertemu dengan investor potensial. Peran sebagai fasilitator ini benar-benar merupakan gaya yang unik, saya belum pernah lihat negara lain melakukan hal-hal seperti ini.



Sumber :autobizz.id

I GUSTI PUTU SURYAWIRAWAN, DIREKTUR JENDERAL KETAHANAN INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kami dari Kementerian Perindustrian sangat mengapresiasi kerja sama dengan Kominfo selama ini, terutama dalam upaya untuk menarik investasi luar negeri sebesar-besarnya. Kita ketahui bersama bahwa dalam era ekonomi digital saat ini, backbone telekomunikasi dan teknologi informasi adalah syarat yang mutlak. Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi kami rasakan sangat membantu pertumbuhan nilai investasi di Indonesia. Fleksibilitas TKDN yang tidak hanya terpaku pada kandungan fisik atau hardware juga membuat perusahaan-perusahaan besar seperti Apple berinvestasi di sini.





DAVID RIMBO, ERNST & YOUNG INDONESIA

Pada masa awal Kabinet Kerja, Bapak Menteri Rudiantara mengumpulkan semua unek-unek dari ekosistem ekonomi digital. Bagi Pak Menteri, ekosistem ini merupakan ekosistem yang harus didukung. Setelah itu Beliau meminta pandangan dari E&Y untuk membantu menyusun peta jalan yang bisa mensinkronkan kekuatan-kekuatan ekonomi digital tersebut, dengan arahan: kita ambil dari global best practices. Jalan penyusunan road map tersebut cukup panjang, namun kami menikmatinya karena Pak Menteri ikut dalam proses, bukan hanya memberi instruksi, dan malah menjadi ambassador-nya.

Kita punya pemerintahan, dimotori oleh Kominfo, yang begitu committed untuk mendorong perkembangan ekonomi digital. Dalam sebuah pertemuan Nexticorn kami bahkan berani men-challenge peserta dengan meminta mereka mencari di dunia ini pemerintahan yang sangat terlibat dalam dunia startup dan memfasilitasinya. Ini pemerintahan yang sangat menyadari pentingnya kita menjemput bola, pentingnya kita mengaplikasikan ekonomi digital di semua lini.



Sumber : venturra.com

RUDY RAMAWI, VENTURE CAPITAL

Perbedaan pendekatan sebagai regulator menjadi fasilitator bagi saya sangat jelas sekali. Kalau dulu saya (dalam kapasitas sebagai kepala perwakilan Google Indonesia) dipanggil ke Kominfo untuk uji publik mendengarkan paparan-paparan tentang peraturan yang akan dikeluarkan. Sekarang jika saya dipanggil Pak Menteri biasanya di hari Sabtu pagi, untuk membicarakan akselerasi ekonomi digital. Pernah ketika kami mengunjungi Silicon Valley pada tahun 2015, di hadapan para petinggi perusahaan unicorn dunia, Pak Menteri mengatakan bahwa dalam waktu 3 tahun Indonesia akan memiliki tiga unicorn. Kami yang ada saat itu hanya bisa mengangguk-angguk. Saat ini, ucapan tersebut terbukti benar, ada 4 unicorn yang telah lahir di Tanah Air. Banyak startup yang harus dilahirkan untuk menghasilkan unicorn. Oleh sebab itu lahirlah Gerakan 1000 Startup dan Nexticorn.





Sumber : liputan6.com

AGUNG HARSOYO, KOMISIONER BRTI

Registrasi kartu prabayar sebetulnya telah ada sejak 2005, namun berjalan tak seperti yang kita harapkan. Pada waktu digulirkan dengan lebih serius pada tahun 2018 ini, banyak pihak yang menuduh program ini akan digunakan sebagai upaya pemenangan calon presiden tertentu. Padahal program ini akan sangat bermanfaat sebagai alat untuk melakukan collaborative regulation, seperti untuk penyaluran bantuan sosial agar bisa langsung sampai kepada subjek yang membutuhkan, untuk pengembangan financial inclusion, dan lain-lain. Untuk kita menggunakan mekanisme registrasi terbaik karena bersumber langsung ke server induk Dinas Kependudukan. Program registrasi prabayar juga akan membantu mengurangi hoaks karena pelakunya bisa diidentifikasi dengan cepat.



Sumber : linkedin

DANNY BULDANSYAH, ASOSIASI PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI SELURUH INDONESIA (ATSI)

Memang ada sedikit kontraksi di operator terkait dengan program registrasi kartu prabayar, salah satunya soal revenue. Tapi kami yakin ini adalah program yang sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk masa depan. Demikian juga dengan program lelang frekuensi, ini adalah program yang membuat kami bisa mengembangkan kapasitas dan meningkatkan service level kami kepada pelanggan. Mudah-mudahan di masa depan masih ada spektrum yang diberikan kepada kami, karena kebutuhan untuk itu selalu meningkat, terlebih juga untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia. Selain itu kami juga berharap agar Kominfo bisa secara berkesinambungan memfasilitasi untuk terwujudnya efisiensi industri.





Sumber : @edmanans

EDWIN MANANSANG, KEMENKOPEREKONOMIAN

Indonesia merupakan anggota G20 yang akhir-akhir ini intens membahas ekonomi digital. Kominfo merupakan focal point dan ujung tombak delegasi RI di tingkat internasional tersebut. Ketika negara-negara lain menganggap bahwa ekonomi digital menjadi ancaman, Kominfo justru hadir dengan konsep yang berbeda dengan melihat bahwa ekonomi digital adalah peluang, bisa dijadikan alat untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial. Bahkan, Kominfo berhasil mengajukan note paper dan berhasil diperjuangkan menjadi salah satu poin deklarasi menteri-menteri G20. Ini merupakan prestasi, untuk pertama kalinya note paper delegasi RI diterima menjadi salah satu poin deklarasi di forum tersebut. Kami yang menjadi bagian dari delegasi sangat bangga sekali.

Tahun ini, kembali Kominfo dan delegasi mengusung usulan untuk membentuk Idea Hub bagi negara-negara anggota G20. Ini bukan merupakan hal yang mudah karena membutuhkan kegigihan dan lobby-lobby yang luar biasa. Bahkan Pak Menteri sendiri juga turun tangan, mengumpulkan para duta besar di Jakarta dalam rangka menggolkan usulan tersebut. Ini merupakan contoh. Belum pernah ada yang seperti ini di Indonesia sebelumnya. Terima kasih Pak Menteri, kami merasa sangat terbantu sekali.



SENDY ARIANI MUSISI

Soal sinyal di perbatasan Indonesia saat ini tidak ada bedanya dengan di Jakarta, karena Kementerian Kominfo melalui BAKTI telah membangun jaringan internet Broadband di daerah-daerah 3T.

Contohnya di Pulau Senoa, Natuna. Berkat adanya jaringan serat optik Palapa Ring Barat yang mendukung layanan internet di wilayah Prov. Riau, Kep Riau, Jambi, kini #Sobatkom gak perlu takut lagi pergi sampai ke pelosok Indonesia karena pemerintah hadir untuk pemerataan akses telekomunikasi hingga ke seluruh wilayah Terdepan, Terestinggal, dan Terluar sehingga mimpi Indonesia merdeka sinyal tahun 2020 akan terwujud dan tidak ada lagi wilayah yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi atau blank spot.

Manfaat lainnya dengan hadirnya internet di perbatasan juga memberi daya Tarik bagi traveller, karena selain bisa mengeksplor destinasi wisata yang ingin dikunjungi, mereka juga bisa langsung mengunggah foto/video dan berkomunikasi via sosial media.



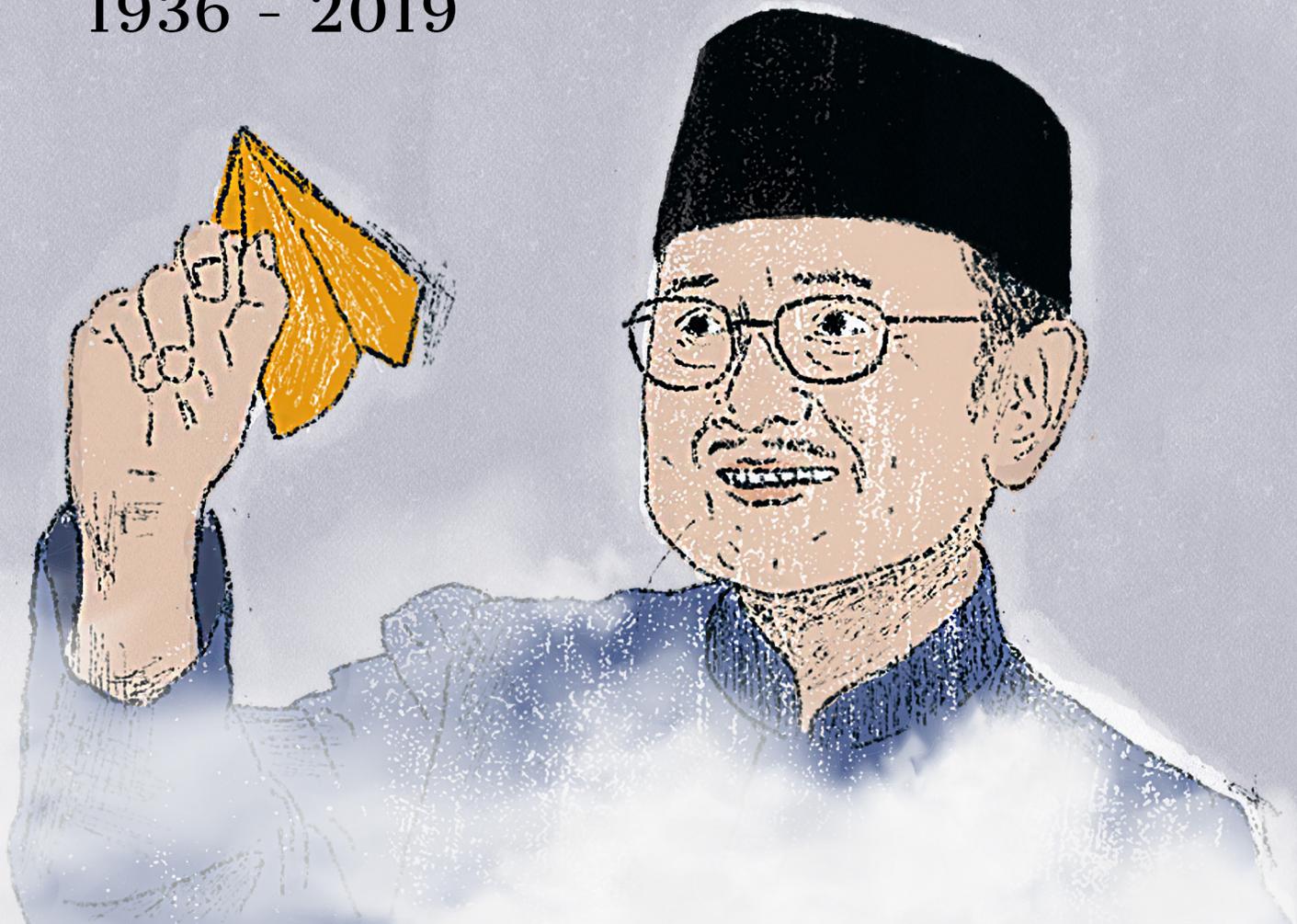


Turut Berduka Cita atas Berpulangannya

B.J Habibie

Presiden Republik Indonesia Ke-3

1936 - 2019



“Akan hadirnya kementerian digitalisasi atau nomenklatur sejenis, yang pernah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kabinet mendatang, menunjukkan bahwa urusan digitalisasi teramat penting untuk dibiarkan berjalan sendiri.”

Menkominfo Rudiantara



IST

